

# LAPORAN KINERJA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TA 2021



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

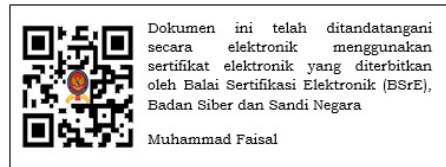
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

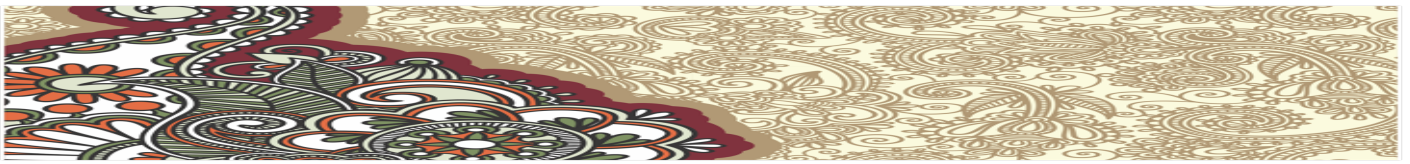
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2022

Kepala Satuan Pengawasan Internal





## KATA PENGANTAR



Iklm usaha yang sehat dan pelayanan publik yang baik adalah sinergi yang tepat untuk menegaskan bahwa Persaingan Usaha yang sehat tentunya dapat tercipta dengan dukungan pelaku usaha dan masyarakat umum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah ada sejak tahun 2000, saat ini juga masih membutuhkan partisipasi aktif dari semua lini pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi. Partisipasi ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks sehingga membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

Pada Tahun 2021, kami telah mengukur tingkat persaingan usaha melalui Indeks Persaingan Usaha yang ternyata menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,81 dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4,67. Aspek penting lain yang mencirikan adanya upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah perubahan yang berkesinambungan di berbagai pemangku kepentingan. Perubahan tersebut senantiasa dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga kami dapat menyempurnakan pencapaian – pencapaian yang telah diraih pada periode sebelumnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha diamanatkan untuk melakukan penegakan hukum, penyampaian rekomendasi kebijakan, penilaian merger dan akuisisi, serta memberikan layanan untuk seluruh pelaku usaha dan masyarakat dengan sangat memperhatikan kualitas. Hal inilah yang menjadi kunci utama pencapaian kinerja kami sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2020 – 2024. Seluruh kebijakan yang ditempuh oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah upaya peningkatan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

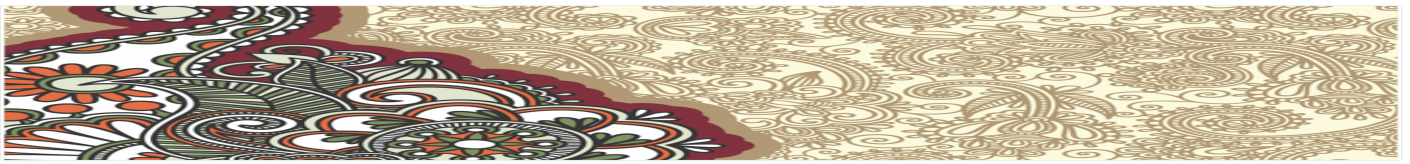
Pada kesempatan ini, kami sampaikan juga penghormatan kami kepada Bapak Kodrat Wibowo selaku Ketua KPPU Periode 2020 – 2021 yang telah mengantarkan KPPU mengawali tahun 2021 dan menyumbangkan pemikiran – pemikiran beliau untuk kemajuan KPPU di tingkat nasional dan internasional.

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan acuan kami untuk melakukan evaluasi dan menyusun langkah – langkah strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU pada tahun – tahun berikutnya. Pada kesempatan ini, kami panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu kepada KPPU untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2021 dan semoga kita senantiasa mendapat lindungan-Nya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Salam Persaingan Sehat! Pulih, Bangkit dan Bersaing!

Jakarta, Februari 2022  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ukay Karyadi



## RINGKASAN EKSEKUTIF

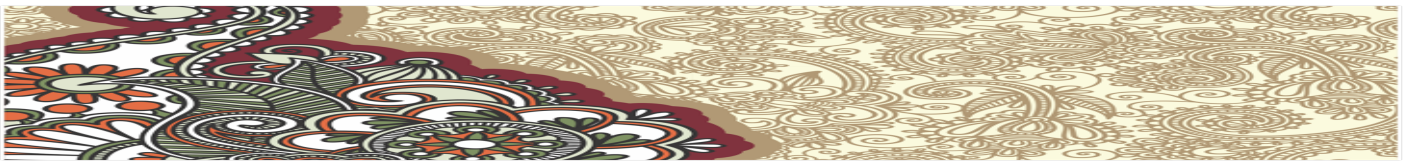
Penyusunan Laporan Kinerja KPPU TA 2021 adalah pemenuhan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Instansi dalam mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja KPPU TA 2021, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dapat mencermati berbagai informasi utama tentang tugas, fungsi dan peran KPPU dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Catatan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU pada Tahun 2021 adalah prestasi KPPU yang digambarkan dari capaian kinerja yang sesuai target atau bahkan terlampaui dan merupakan capaian target yang diraih KPPU dalam situasi Pandemi Covid – 19. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU telah mencermati kondisi yang dihadapi pada Tahun 2020 dan mengimplementasikannya dengan baik dalam pemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh KPPU.

Berikut adalah penjelasan umum dari target dan akuntabilitas kinerja KPPU:

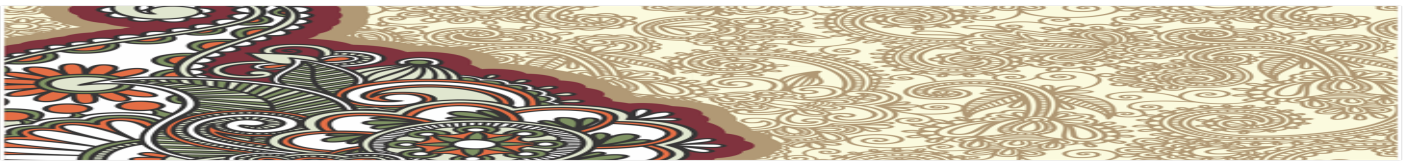
- 1) Hasil pengukuran kinerja tingkat Lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) TA 2021 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, menunjukkan bahwa 2 (tiga) indikator kinerja (100%) telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai 100% ;
- 2) Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha melebihi target TA 2020 yaitu realisasi 4,81 dengan target 4,7 atau realisasi capaian sebesar 102%;
- 3) Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1, pada Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku sebesar 117% yang terealisasi 100% dari target 85%;
- 4) Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 pada Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan



data, skala 1 - 100) tercapai sebesar 97% yang terealisasi 76 dari target 78;

- 5) Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada TA 2021 memperoleh anggaran total sebesar Rp 141.290.622.000,-, dengan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp 33.498.875.000,- (46,65%) dari total anggaran KPPU non-operasional sebesar Rp 71.802.425.000,- dan untuk melaksanakan SS-1 dikelompokkan kedalam anggaran *Core*. Sedangkan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp 38.303.550.000,- (53,34%) dari total anggaran KPPU non-operasional Rp 71.802.425.000,- dan untuk melaksanakan SS-2 dikelompokkan kedalam anggaran *supporting*;
- 6) Realisasi anggaran KPPU yang terdiri 2 (dua) Program TA 2021 sebesar Rp 136.467.729.454,- atau mencapai 96,59% dari total pagu sebesar Rp 141.290.622.000,- .
- 7) Faktor pendukung yang berperan dalam capaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kondisi penyesuaian kondisi penyesuaian kebiasaan baru ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di TA 2021 yaitu:
  - a. Pemenuhan pencapaian *output* yang dilakukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah dengan mengalihkan sebagian proses investigasi, persidangan dan sosialisasi menjadi *online* (dengan penerbitan Perkom Nomor 1 tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik, yang dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan format kegiatan pada kondisi Pandemi Covid - 19) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan *online*.
  - c. Penyesuaian target dilakukan dengan melihat kesesuaian antara upaya pencapaian target dengan perubahan format kegiatan.
  - d. Koordinasi antara KPPU di pusat dan di daerah dilaksanakan secara *offline* dan *online* secara intensif untuk meningkatkan peran dan kontribusi kantor wilayah.

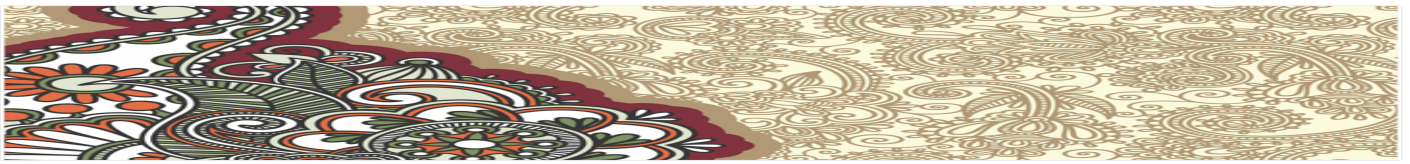
Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPPU pada periode 2020 – 2024, serta adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) memberikan dampak pada perluasan tugas dan fungsi KPPU terkait kemitraan dan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu:



- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

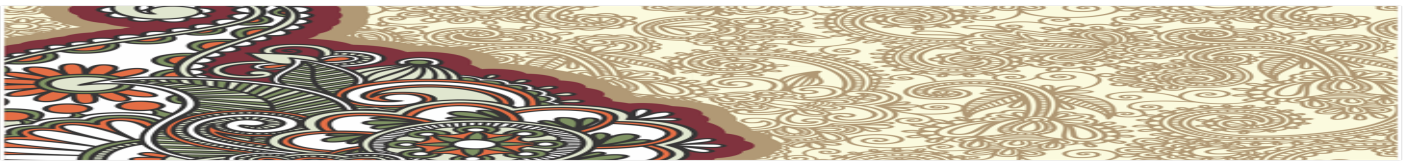
Adanya perluasan tugas dan fungsi tersebut, KPPU tetap menjaga pemenuhan target kinerja yang telah disepakati dalam Renstra KPPU 2020-2024, maka langkah – langkah yang untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 adalah:

- 1) Melakukan penyiapan dasar hukum dan perbaikan dasar yang ada di KPPU dalam rangka antisipasi dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
- 2) Melakukan penyesuaian dan pemberlakuan tata cara yang baru untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.
- 3) Melakukan penambahan ketentuan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kondisi KPPU sebagai Lembaga non struktural
- 4) Melakukan pencapaian output secara efisien dengan menyusun kembali alur Koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga/program.
- 5) Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif untuk mencari solusi dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga.
- 6) Melakukan penataan Manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR ISI

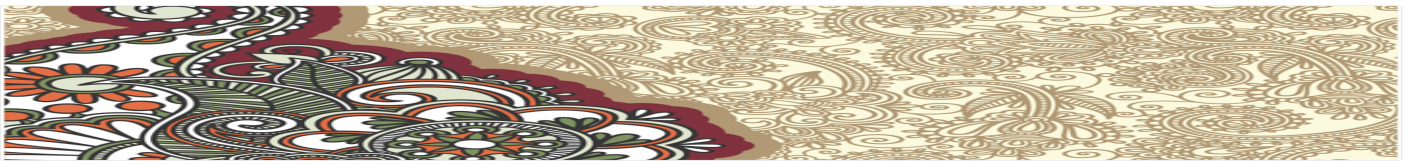
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
LAMPIRAN .....	viii
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A. TUGAS DAN FUNGSI .....	2
B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU).....	4
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	6
D.    SISTEMATIKA PELAPORAN .....	7
BAB II .....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. TARGET KINERJA TAHUN 2021 .....	16
D.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	17
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA TA 2021 .....	21
B. ANALISIS EFISIENSI .....	33
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	37
BAB IV .....	40
PENUTUP .....	40
A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN .....	40
B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA .....	41



## DAFTAR TABEL

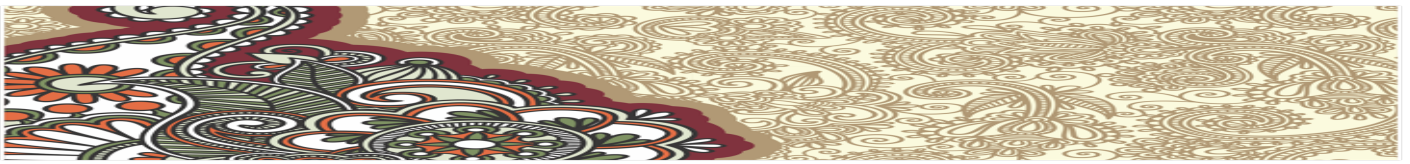
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi KPPU .....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai KPPU TA 2021 .....	5
Tabel 1.3	Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024 .....	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	15
Tabel 2.2	Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2021 .....	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	17
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	18
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon 1 KPPU TA 2021 .....	19
Tabel 3.1	Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2021 .....	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha) .....	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 (Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku) .....	27
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 (Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government).....	30
Tabel 3.5	Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2021 .....	31
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2020 dan 2021 .....	34
Tabel 3.7	Perbandingan Nilai Indeks Persaingan Usaha Tahun 2021 dan 2020 .....	35
Tabel 3.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2021 .....	38





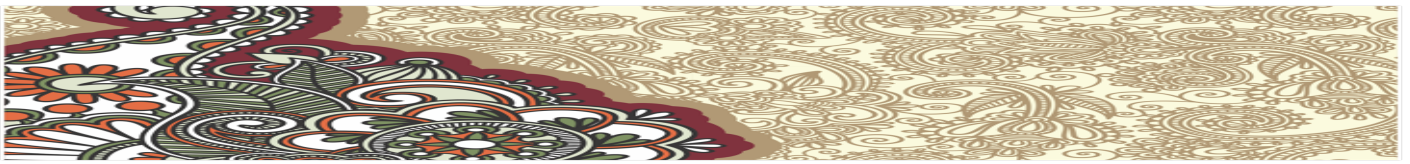
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPPU .....	5
Gambar 2.1	Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 .....	10
Gambar 2.2	Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024 .....	11
Gambar 2.3	Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021 .....	12
Gambar 2.4	Alokasi Anggaran KPPU TA 2021 .....	13
Gambar 2.5	Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2021 .....	14
Gambar 2.6	Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I KPPU TA 2021 .....	19
Gambar 3.1	Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia .....	25
Gambar 3.2	Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha .....	26
Gambar 3.3	Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2 .....	34
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU TA 2021 dan TA 2020 .....	38



## LAMPIRAN

- Lampiran I : 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2021
2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024
- Lampiran II : 1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2021 (Sasaran Strategis)
2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2021
3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga TA 2021
4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2021 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional
5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2021 pada Program Dukungan Manajemen Kegiatan Operasional Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional
6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2020 dan 2021
7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNB dari Denda Persaingan Usaha TA 2020 dan 2021
8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2021 (menurut Sasaran Strategis)
9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU TA 2021 dan 2020
- Lampiran III : 1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dan Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi TA 2021
2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2021
3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum TA 2021
4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi TA 2021



5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2021
6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut Road Map SDM 2020 – 2024
7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data *Eksisting* Pegawai KPPU (per 31 Desember 2021)
8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2021
9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2021 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)
10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2021 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional

# BAB I

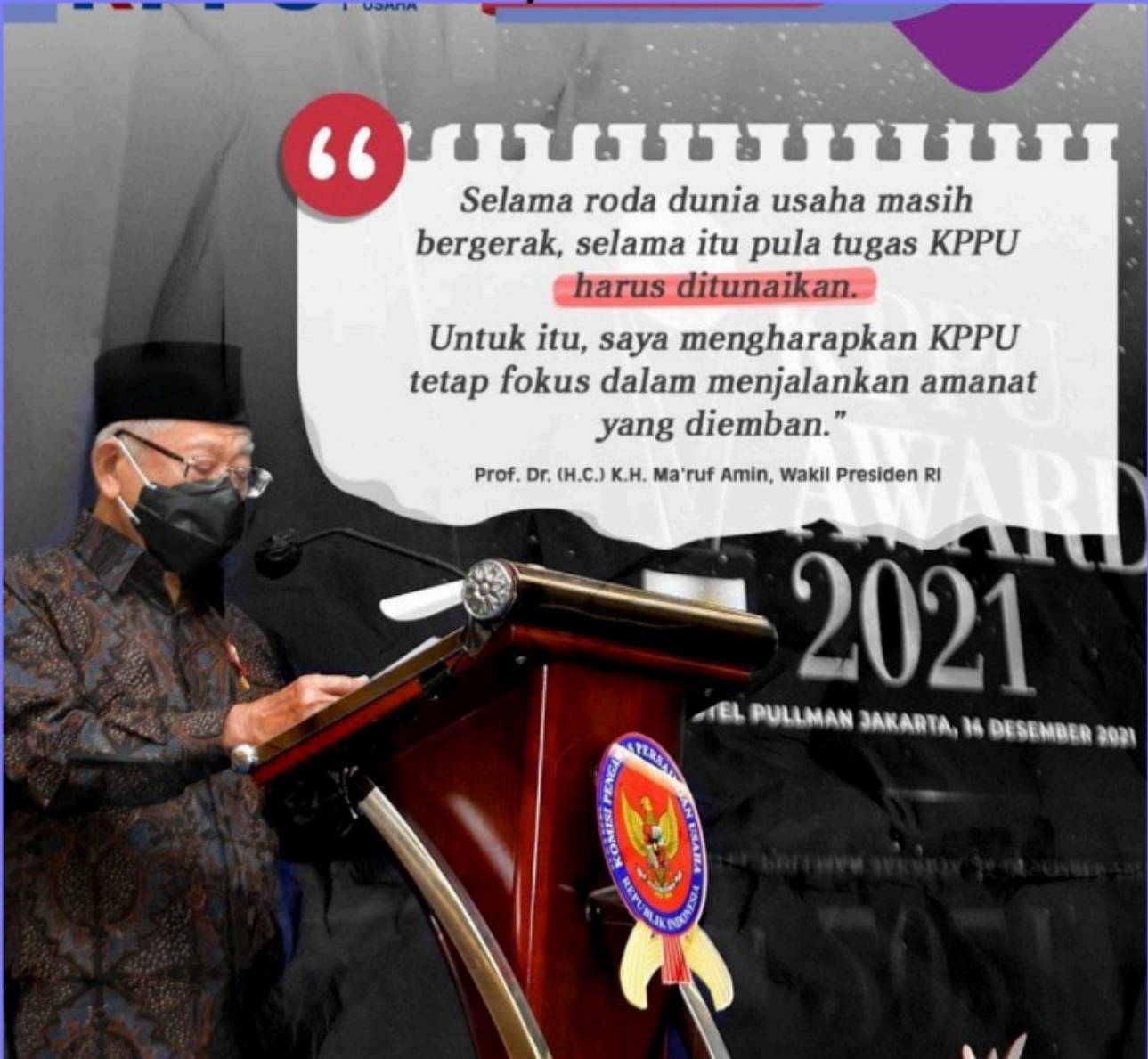
## Pendahuluan

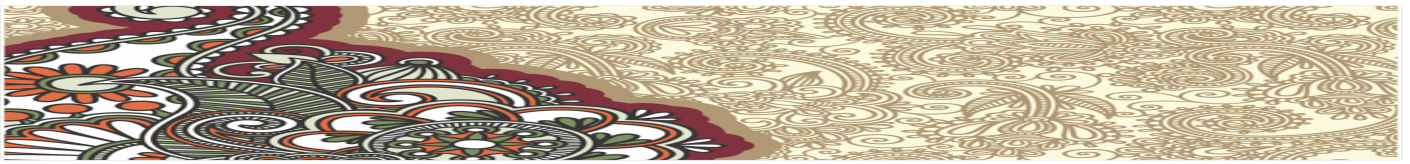
“

*Selama roda dunia usaha masih bergerak, selama itu pula tugas KPPU harus ditunaikan.*

*Untuk itu, saya mengharapkan KPPU tetap fokus dalam menjalankan amanat yang diemban.”*

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI





## **BAB I PENDAHULUAN**

Persaingan usaha yang sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan merupakan perwujudan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga tercipta kompetisi yang sehat dan adil. Dalam perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan Lembaga Negara yang dibiayai APBN juga diwajibkan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, hal itu sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah berupa Laporan Kinerja.

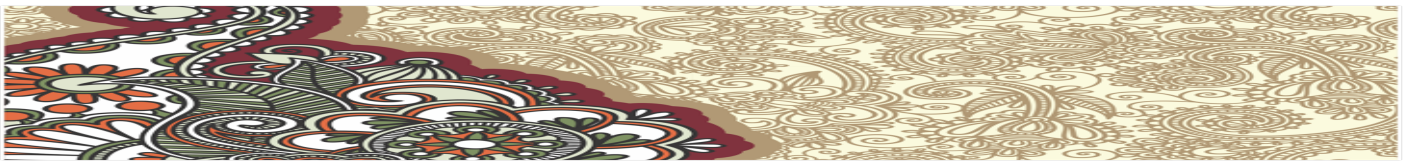
Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat atas penggunaan anggaran negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber-sumber anggaran lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan selama masa satu Tahun Anggaran 2021.

### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan fungsi KPPU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada periode RPJMN 2020 -2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kabinet Kerja telah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dan “ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” menjadi prioritas pertama dengan arah



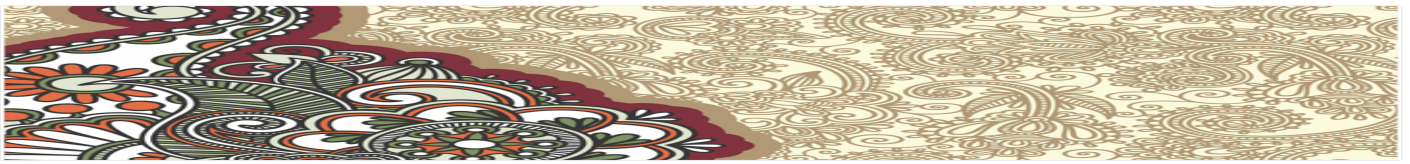
kebijakannya yang tertuang pada Program Prioritas (PP) Nomor 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut:

1. Program Prioritas Nomor 5 (lima) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
  - Kegiatan prioritas: peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
  - Kegiatan Prioritas: perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan

Penjelasan rinci tentang tugas dan fungsi KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi KPPU

No	Tugas	No	Fungsi
1	Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;	1	Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
2	Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;	2	Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
3	Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;	3	Pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
4	Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;	4	Pelaksanaan administratif.
5	Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;		
6	Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;		
7	Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.		



## **B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

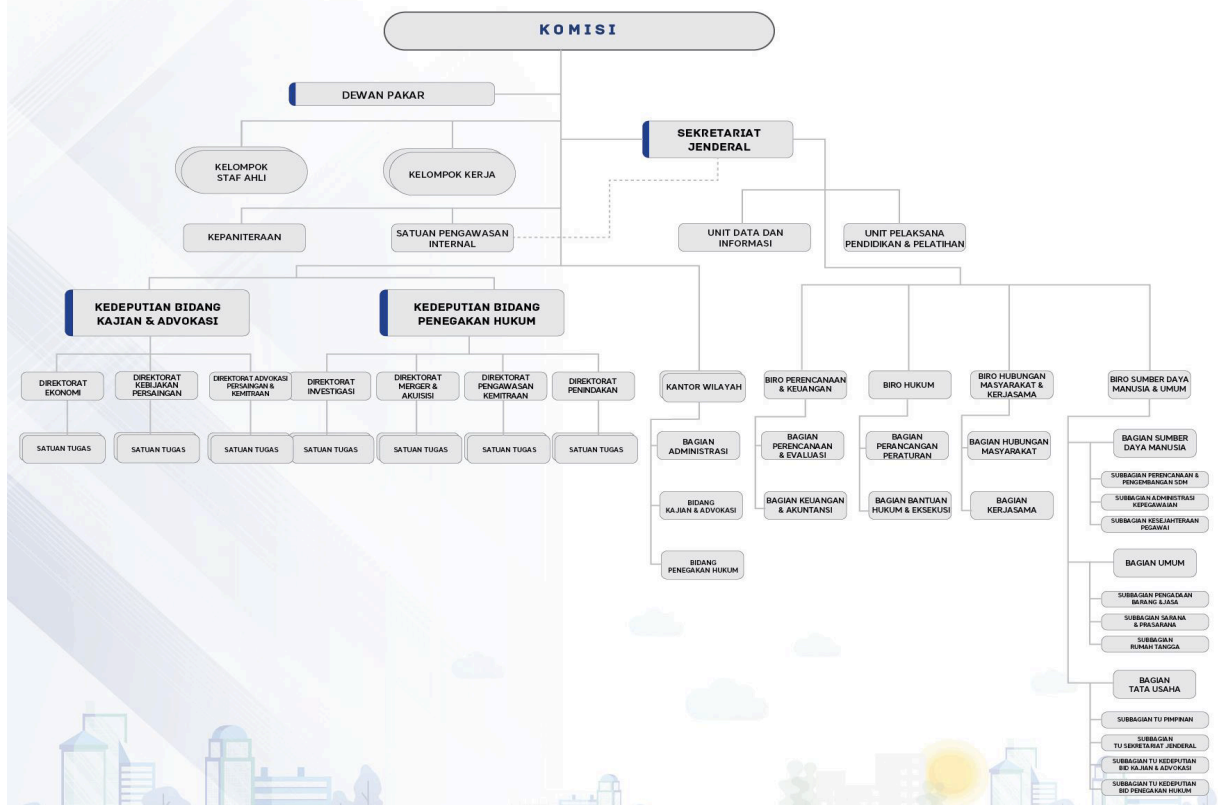
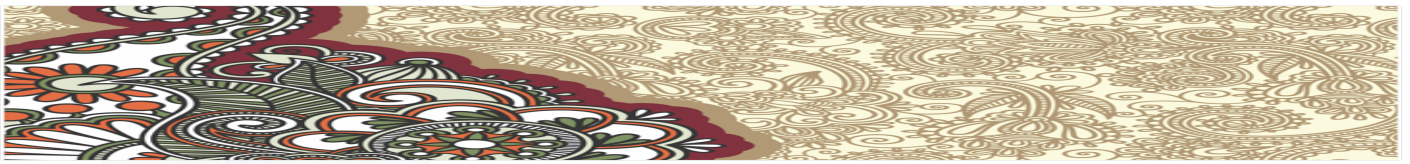
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, organisasi KPPU terdiri dari Ketua Komisi, Anggota Komisi yang dibantu Sekretariat. Sekretariat itu sendiri terdiri:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
3. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Ketua dan Anggota Komisi juga dibantu oleh 1 (satu) Unsur Pengawas dan 4 (empat) Unsur Pendukung yakni:

1. Satuan Pengawasan Internal;
2. Kepaniteraan;
3. Kelompok Kerja;
4. Kelompok Staf Ahli; dan
5. Kantor Wilayah.

Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja KPPU ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPU

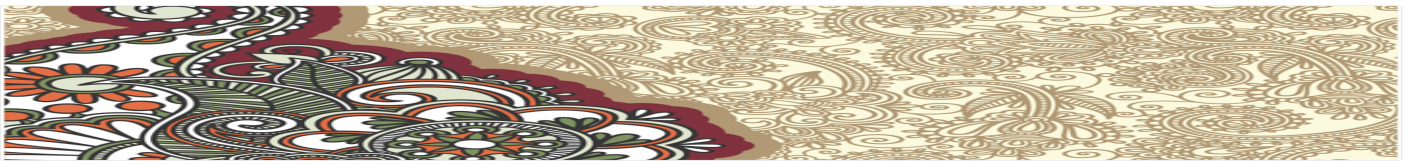
KPPU sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan bagian dari 9 orang Komisioner berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 1999, dicantumkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh 5 Sekretariat. Saat ini jumlah pegawai sekretariat KPPU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 446 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai KPPU TA 2021

No.	Unit Eselon I	Jumlah
1.	Sekretariat Jenderal	341 Pegawai
2.	Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi	30 Pegawai
3.	Kedeputian Bidang Penegakan Hukum	75 Pegawai
	<b>TOTAL</b>	<b>446 Pegawai</b>





### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Persaingan sehat adalah pencapaian utama KPPU dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sejak tahun 2000. KPPU mendukung terwujudnya bangsa yang berdaya saing dan kemandirian ekonomi secara nasional.

KPPU juga berkontribusi dalam Agenda Pembangunan Pertama sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Nasional (PN): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran PN tersebut adalah:

1. Sasaran pertama, Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Sasaran kedua, Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Amanat PN diatas diturunkan oleh KPPU pada Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 yang telah diundangkan melalui Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 602 pada tanggal 11 Juni 2020.

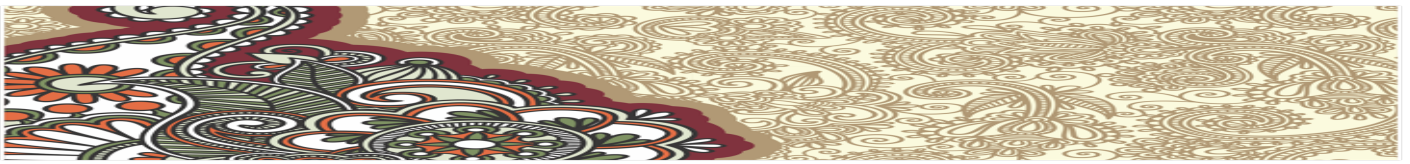
Pada Renstra 2020-2024 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi misi Presiden 2019-2024.

Sasaran Strategis KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)

Pada Tahun Anggaran 2021 KPPU termasuk Lembaga yang terdampak kondisi adanya Pandemi Covid-19 sehingga KPPU melakukan penyesuaian output dan format pelaksanaan program dan kegiatan.



#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

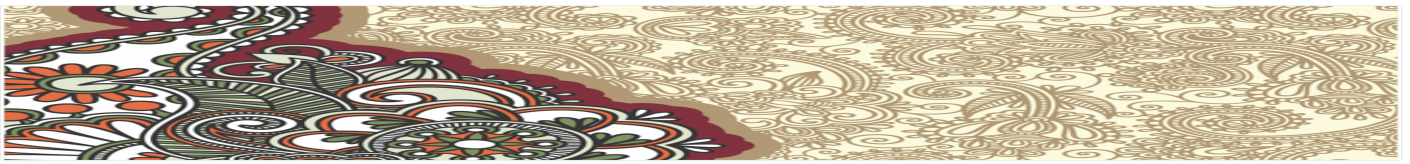
1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Prioritas Nasional dan Renja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Membandingkan, menganalisis dan menjabarkan kinerja KPPU Tahun 2021 yang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari seluruh sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Pada subbab ini juga menjelaskan rata-rata capaian kinerja dari keseluruhan sasaran strategis, apakah telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan/penurunan pencapaian kinerja.
4. Bab IV Penutup  
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPPU Tahun 2021 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

# BAB II

## Perencanaan Kinerja



2021



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan persaingan usaha yang mendukung keberhasilan Visi Misi Presiden, sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

#### **Visi:**

**“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian  
berlandaskan gotong-royong”**

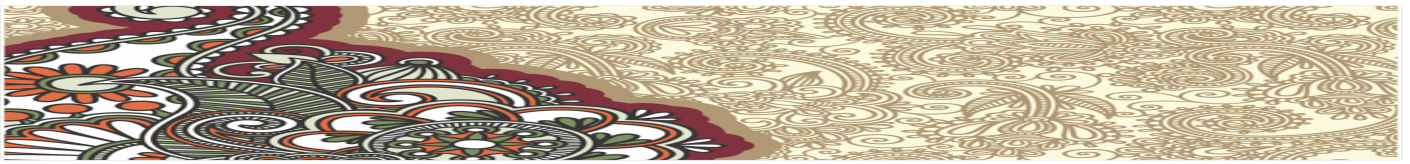
KPPU merancang rencana strategis yang selaras dengan Visi Misi Presiden dan merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan**

Selanjutnya tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

**“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk  
mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan  
berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**



Untuk mendukung pencapaian tujuan, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPPU sebagai berikut:

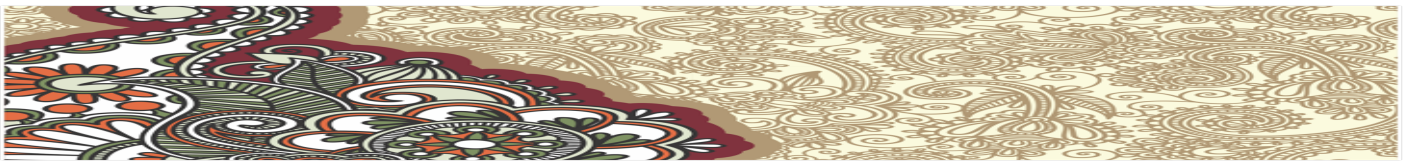
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*

### **Prioritas Nasional**

Dalam amanat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dijelaskan keterkaitan antara Misi Presiden, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Dalam hal penugasan KPPU yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maka pencapaian sasaran pembangunan, indikator yang bermuara pada pencapaian target pembangunan yang ditugaskan kepada KPPU pada RPJMN 2020-2024, KPPU harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.



Gambar 2.1 Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

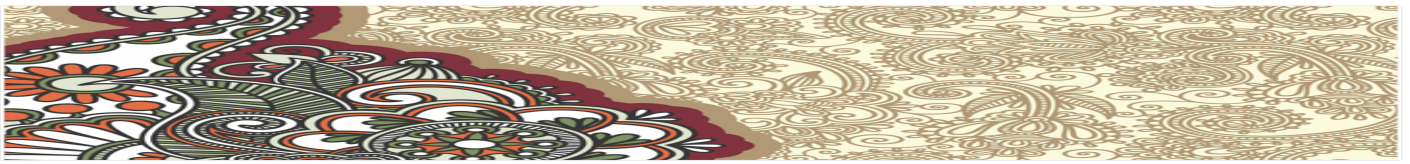


Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional ke-satu (PN-1)  
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Gambar 2.2 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024

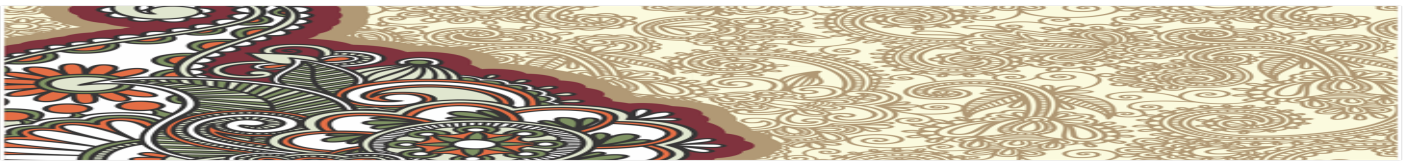
Dengan mengacu pada Renstra KPPU 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPPU Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602) pada tanggal 11 Juni 2020, maka indeks persaingan usaha dapat digunakan untuk mengukur kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*) akhir dari berbagai proses dan output yang telah dilakukan dan digunakan KPPU untuk mendorong persaingan usaha yang sehat agar terjadi efisiensi ekonomi nasional yang menjadi dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU 2020-2024.



Gambar 2.3 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2020, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. KPPU dalam RKP 2021 mendukung pencapaian Prioritas Nasional Kesatu (PN-1) yaitu **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**. Pencapaian keberhasilan target PN-1 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut, diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-1 sendiri terbagi ke dalam 8 (delapan) PP.

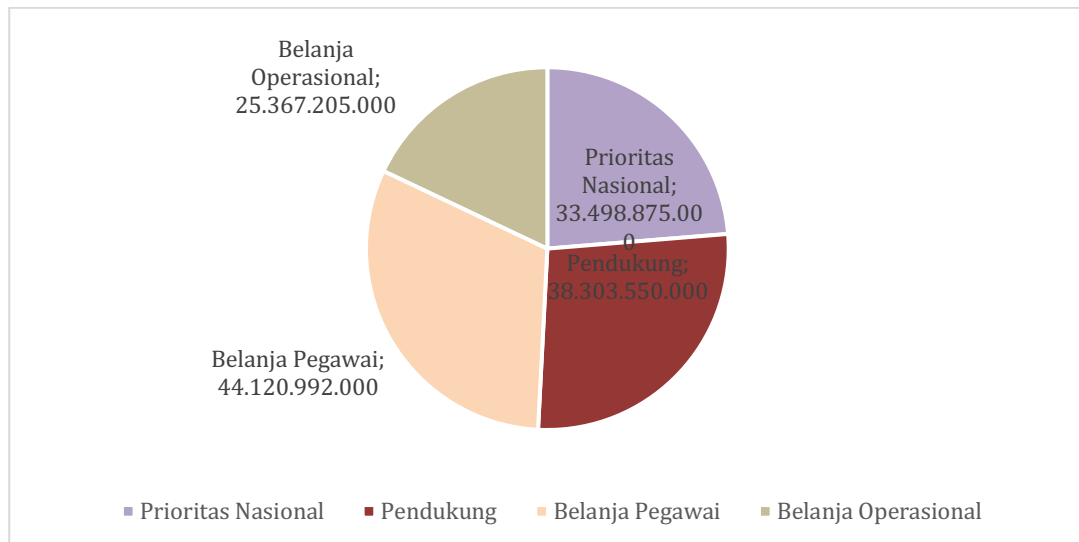
PN-1 yang dalam turunannya melalui PP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2020-2024 untuk 2 (dua) PP yaitu PP 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.



Pada TA 2021, KPPU melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Dukungan KPPU terhadap pencapaian PN-1 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha. Total alokasi anggaran KPPU pada Pagu Awal TA 2021 sebesar **Rp 118.485.015.000,-** (Seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan lima juta lima belas ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi sebesar **Rp 141.290.622.000,-** (Seratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena KPPU mendapatkan tambahan pemanfaatan PNBP khususnya dari denda persaingan usaha, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, maka KPPU dapat memanfaatkan sebesar 44% dari PNBP. Penggunaan PNBP dapat dialokasikan untuk kegiatan dalam rangka:

- 1) Penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur pada KPPU; dan/atau
- 2) Mendorong peningkatan PNBP pada KPPU.

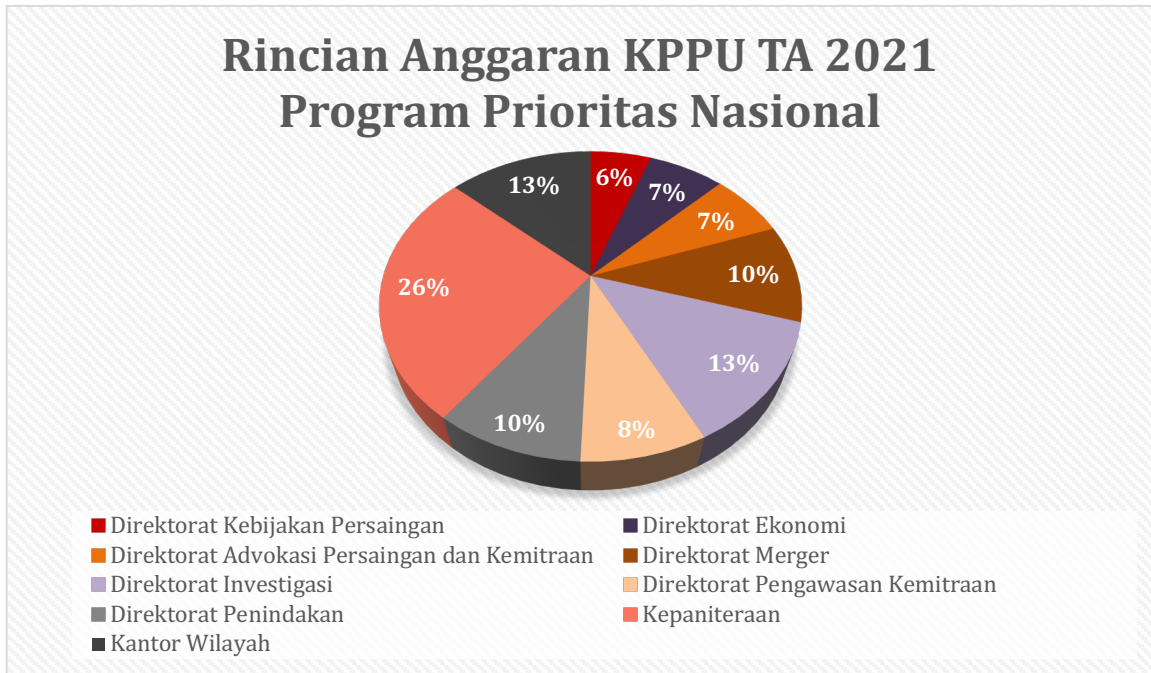
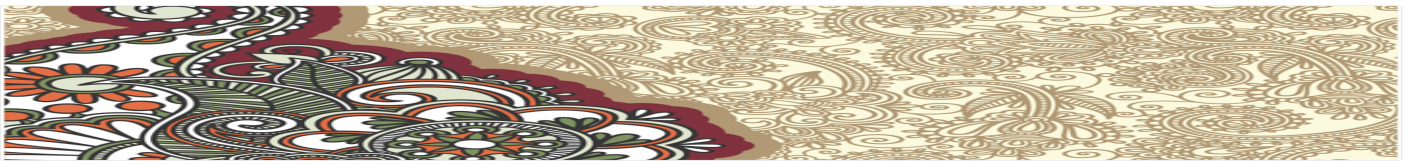
Alokasi Anggaran KPPU TA 2021 untuk mendukung PN-1 dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Alokasi Anggaran KPPU TA 2021

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Berikut rincian Pagu Akhir Anggaran KPPU TA 2021 yang masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam Grafik sebagai berikut:

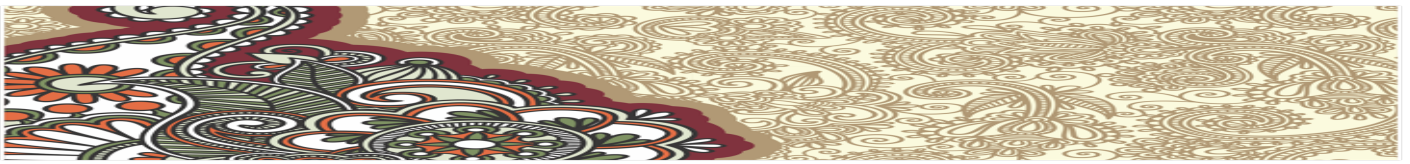




Gambar 2.5 Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2021

KPPU pada TA 2021 sudah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengawasan Persaingan Usaha yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha
  - b. Analisa Kebijakan Pemerintah
  - c. Advokasi Persaingan Usaha dan advokasi kemitraan
  - d. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - e. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - f. Penanganan Perkara Persaingan Usaha
  - g. Penilaian Merger dan Akuisisi
  - h. Pengawasan Kemitraan
  - i. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU
  
2. Program Dukungan Manajemen yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
  - c. Peningkatan Data dan Informasi
  - d. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi
  - e. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga
  - f. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU
  - g. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU



Pada program Dukungan Manajemen juga melakukan pengelolaan Belanja Operasional yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor.

Selanjutnya untuk rincian target Output (KRO/RO) Kegiatan di KPPU TA 2021 yang tergabung pada Program Pengawasan Persaingan Usaha merupakan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional khususnya pada PN-1 TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

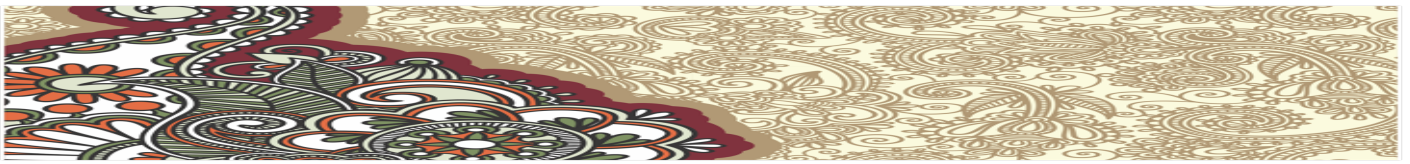
Pengukuran pencapaian sasaran strategis ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan targetnya pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (perbaikan yang berkesinambungan).

Selanjutnya pada Periode Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 akan bergeser pada upaya pencegahan dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, dengan tetap memperhatikan penegakan hukum pada dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersusun dari Indikator Sasaran Strategis yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pelaku usaha, *stakeholder* terkait dan instansi pemerintah serta KPPU sendiri. IKU KPPU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berikut IKU KPPU dapat dilihat dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategisi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0
	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%



Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategisi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

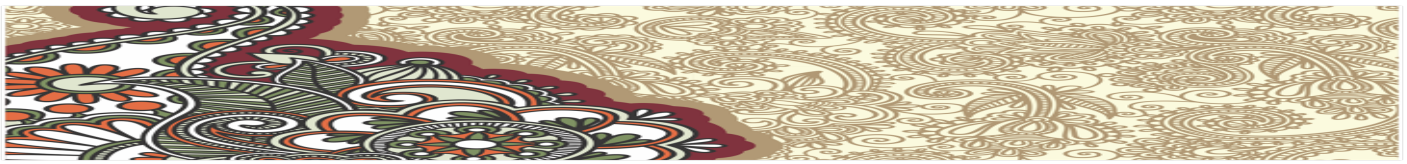
Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

### C. TARGET KINERJA TAHUN 2021

Selanjutnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPPU Tahun 2021 dimulai sejak awal tahun 2020 yang mendasarkan pada RKP 2021 dan Renstra KPPU 2020-2024. Serta pada proses penyusunan Renja/RKP TA 2021 telah dilakukan penyelarasan perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RSPP tersebut disampaikan melalui Surat Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dengan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dampak adanya implementasi RSPP tersebut, pada Renja/RKP KPPU Tahun 2021 sudah menggunakan 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tersebut dilakukan pembahasan dalam berbagai forum internal maupun eksternal. Hasil pembahasan terkait target kinerja dan rincian program tersebut telah disepakati dan disampaikan dalam forum *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, KPPU mendapat pagu anggaran pada Pagu Awal TA 2021 sebesar **Rp118.485.015.000,-** (Seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi sebesar **Rp141.290.622.000,-** (Seratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2 Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2021

<b>Program</b>	<b>Pagu Awal (Rp)</b>	<b>Pagu Akhir (Rp)</b>
Program Pengawasan Persaingan Usaha	<b>26.553.100.000,-</b>	<b>33.498.875.000,-</b>
Program Dukungan Manajemen	<b>22.843.718.000,-</b>	<b>38.303.550.000,-</b>
Belanja Pegawai	<b>44.120.992.000,-</b>	<b>44.120.992.000,-</b>
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	<b>24.967.205.000,-</b>	<b>25.367.205.000,-</b>
<b>Total</b>	<b>118.485.015.000,-</b>	<b>141.290.622.000,-</b>

Dengan alokasi anggaran TA 2021 tersebut, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP/Renja) TA 2021 ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.3 berikut:

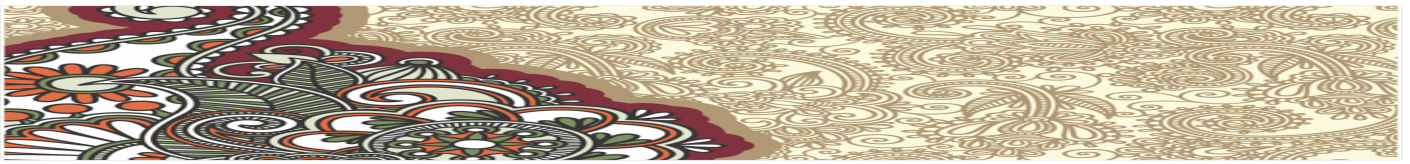
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>	<b>Target 2021</b>
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7
	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	85%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	78

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja KPPU TA 2021 telah disepakati pada tanggal 1 Januari 2021 dan diperbarui setiap Triwulan untuk memastikan bahwa kinerja telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang



direncanakan. Perjanjian Kinerja untuk alokasi anggaran KPPU TA 2021 sebesar Rp141.290.622.000,- telah disepakati pada awal Triwulan IV TA 2021 dan dilakukan konfirmasi kembali Perjanjian Kinerja tersebut sesuai persetujuan Ketua KPPU pada Tahun Anggaran berikutnya. Perjanjian Kinerja untuk Triwulan IV TA 2021 harus dikonfirmasi kembali karena berada dalam masa transisi pergantian Ketua KPPU. Dokumen Perjanjian Kinerja KPPU Tahun 2021 disajikan dalam Lampiran I

Perjanjian Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Lembaga berisi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis TA 2021 dan target yang dirincikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

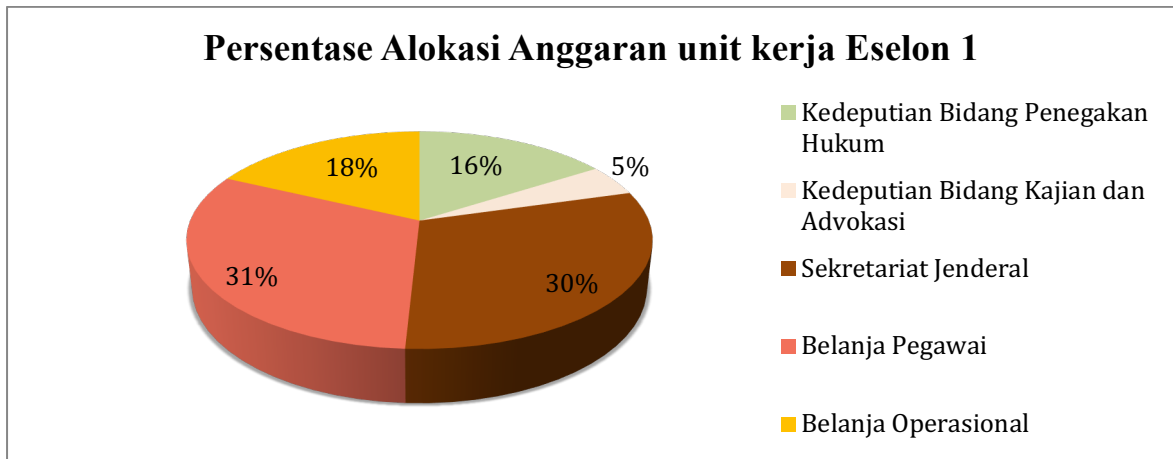
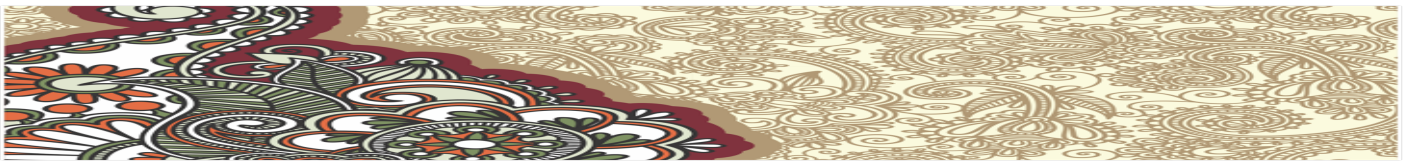
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2021
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7
	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	85%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	78

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

Rincian alokasi anggaran untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Sasaran Strategis KPPU TA 2021 telah dijelaskan sebelumnya.

Berikut adalah alokasi anggaran per unit kerja Eselon 1 KPPU TA 2021 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.6 Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I KPPU TA 2021

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon 1 KPPU TA 2021

Unit Eselon I		Pagu Akhir (Rp)
1	Kedeputian Kajian dan Advokasi	6.539.071.000,-
2	Kedeputian Penegakan Hukum	22.512.875.000,-
3	Sekretariat Jenderal	42.750.479.000,-
	Belanja Pegawai	44.120.992.000,-
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	25.367.205.000,-
<b>Total</b>		<b>141.290.622.000,-</b>

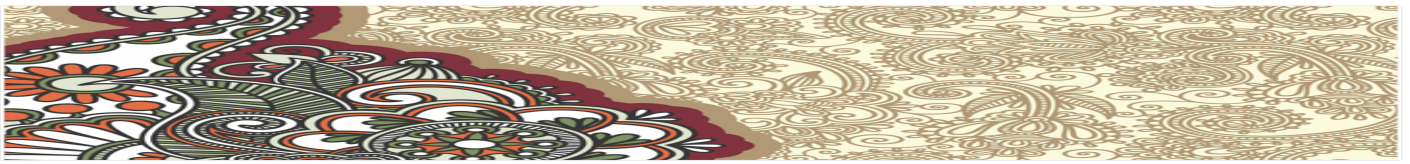
### **Pengukuran Kinerja**

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran KPPU, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangannya ataupun kendalanya dalam aplikasi SMART dan e-Monev. SMART merupakan sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, sedangkan e-Monev merupakan sistem informasi di bawah BAPPENAS.

Berdasarkan kebijakan internal KPPU, maka untuk terlaksananya tertib administrasi, maka setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh para pejabat struktural setingkat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada masing – masing Eselon I.

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk



- mencapai tujuan/ sasaran;
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran;
  5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
  6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;
  7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Dasar formula penghitungan pengukuran kinerja tingkat Lembaga yaitu KPPU untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis dijelaskan dalam 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 100.1/SJ/Kep/III/2021 tentang Penetapan Indikator Utama Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
2. Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi Nomor 25/DKA/Kep/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 376/DH/Kep/III/2021 tentang Penetapan Indikator Utama Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

# BAB III

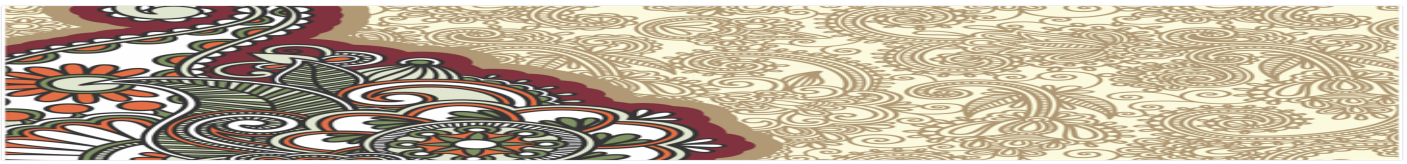
# Akuntabilitas

# Kinerja



KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA  
TA 2021





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TA 2021

#### 1) Ringkasan Kinerja

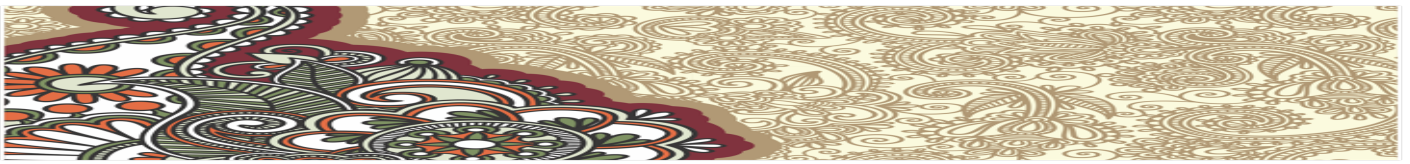
Hasil pengukuran kinerja tingkat Lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) TA 2021 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis terdapat 2 indikator kinerja (100%) telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Berikut ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada setiap Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2021

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	Indeks	4.7	4.81	102%	●
1.2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	85%	100%	117%	●
2.	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	Indeks	78	76	97%	●

Sumber: KPPU, data 2021 diolah

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target



Untuk rekapitulasi realisasi anggaran dan target output (KRO/RO) Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Pengawasan Persaingan Usaha dan kegiatan pendukung operasional Prioritas Nasional yang masuk pada Program Dukungan Manajemen dapat dilihat Lampiran III.

## 2) Uraian Kinerja

Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7); dan
- b. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku.

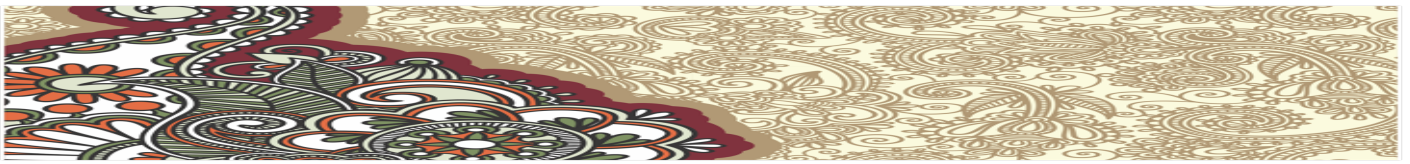
Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

### **1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat**

#### **1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.1): Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7) diukur dengan formula penghitungan yaitu:

Survei Indeks Persepsi Persaingan Usaha



Pada Tahun 2021, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999, Indeks Persepsi Persaingan Usaha dengan skala 1 – 7) untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu sebesar 102% yang terealisasi 4.81 (Indeks skala 1-7) dari target 4.7 (Indeks skala 1-7) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut:

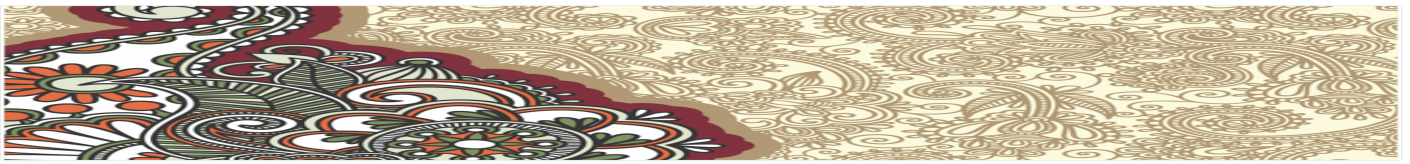
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4,7	4,81

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024, data 2021 diolah

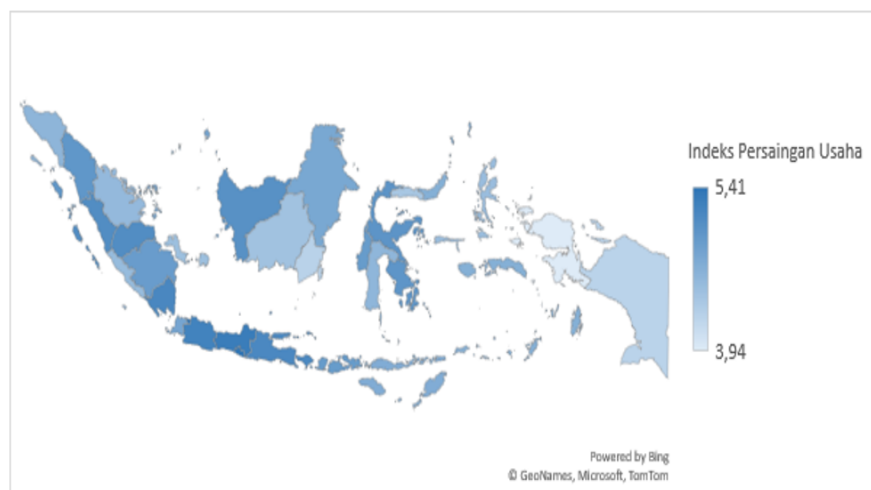
Pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha yang menjadi Indikator Kinerja Utama KPPU melalui pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kedeputusan Kajian dan Advokasi yang dilakukan melalui pelaksanaan survei kajian indeks persaingan usaha yang dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi melalui pengukuran persaingan usaha di setiap provinsi.

Indeks persaingan usaha di setiap provinsi sendiri diperoleh dari proses penjumlahan secara keseluruhan (agregasi) dari indeks persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di masing-masing provinsi tersebut. Seluruh proses penilaian terhadap kondisi persaingan usaha



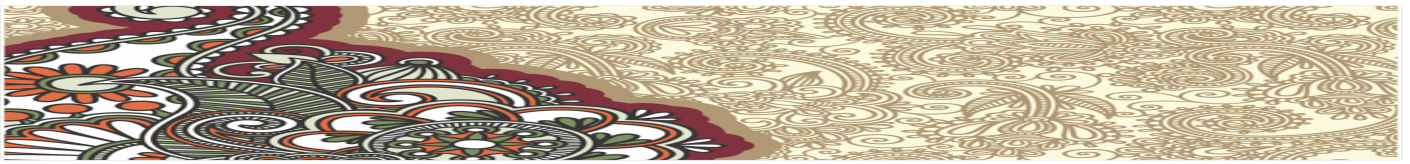
sektoral di setiap provinsi diperoleh berdasarkan persepsi responden yang merupakan *stakeholder* di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya. Terdapat 4 (empat) responden di setiap provinsi yang dapat mewakili untuk menjelaskan persaingan usaha di masing-masing daerahnya yaitu terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (merepresentasikan Pemerintah), Pengurus KADIN (merepresentasikan pelaku usaha), Bank Indonesia dan Akademisi. Objek studi mencakup seluruh 34 Provinsi di Indonesia.

Hasil skor bobot indeks persaingan usaha per provinsi menggunakan dimensi Keseluruhan baik dengan bobot sama atau bobot PCA berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat dijelaskan pada Gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

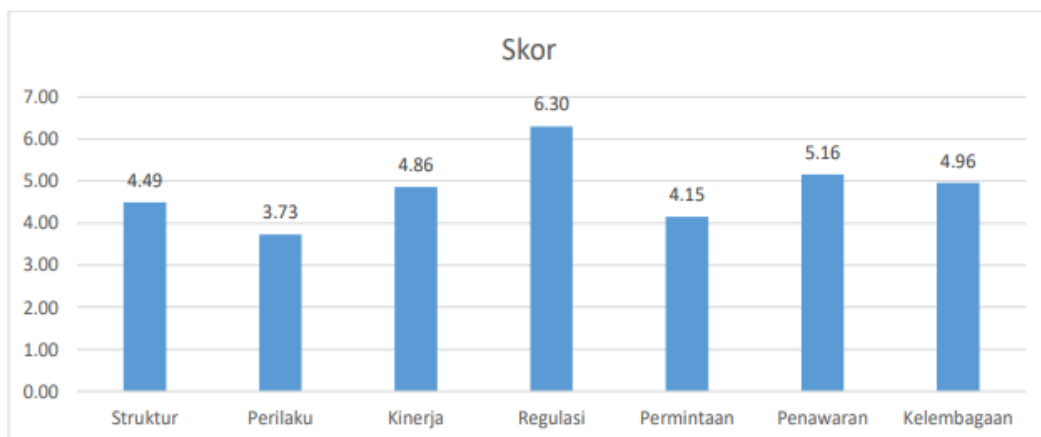
Jika dilihat dari sebaran provinsi pada Gambar 3.1 menunjukkan sepuluh provinsi tertinggi persaingannya masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa terkecuali provinsi Banten. Untuk Provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi berdasarkan dimensi keseluruhan ialah DKI Jakarta dengan skor sebesar 5.41 (bobot sama) dan 5.27 (bobot PCA), Daerah Istimewa Yogyakarta 5.39 (bobot sama) dan 5.25 (bobot PCA), Jawa Tengah 5.31 (bobot sama) dan 5.22 (bobot PCA), Jawa Barat 5.24 (bobot sama) dan 5.12 (bobot PCA), Lampung 5.18 (bobot sama) dan 5.09 (bobot PCA). Untuk daerah di luar pulau Jawa yang termasuk dalam sepuluh besar adalah: Provinsi Lampung,



Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk sepuluh provinsi terendah berdasarkan Gambar 3.1 adalah: Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha terendah berdasarkan dimensi keseluruhan ialah Papua Barat 3.94 (bobot sama) dan 3.73 (bobot PCA), Papua 4.24 (bobot sama) dan 4.11 (bobot PCA), Gorontalo 4.25 (bobot sama) dan 4.03 (bobot PCA), Kalimantan Selatan 4.39 (bobot sama) dan 4.10 (bobot PCA), Kalimantan Tengah 4.45 (bobot sama) dan 4.31 (bobot PCA) dan Bangka Belitung 4.48 (bobot sama) dan 4.39 (bobot PCA).

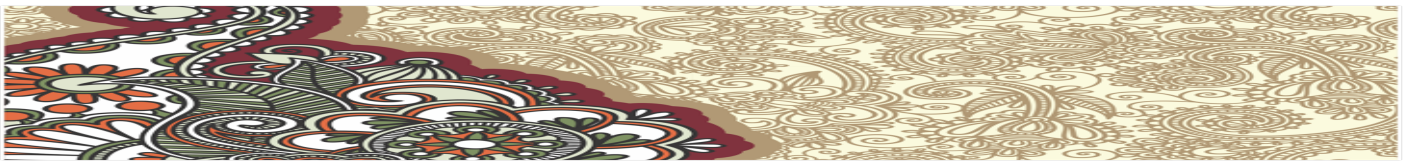
Hasil rata-rata skor indeks persaingan usaha per dimensi berdasarkan dimensi keseluruhan dijelaskan dalam Grafik sebagai berikut.



Sumber: KPPU, data 2021 diolah

Gambar 3.2 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

Grafik diatas menunjukkan dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi terkecil dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.50, 3.74 dan 4.86. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan



usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dari sisi pasar, dimensi permintaan dan penawaran memiliki indeks yang juga tidak cukup tinggi untuk mengarahkan pada persaingan yang tinggi. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.30, yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.

### **1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.2): Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku diukur dengan formula penghitungan yaitu:

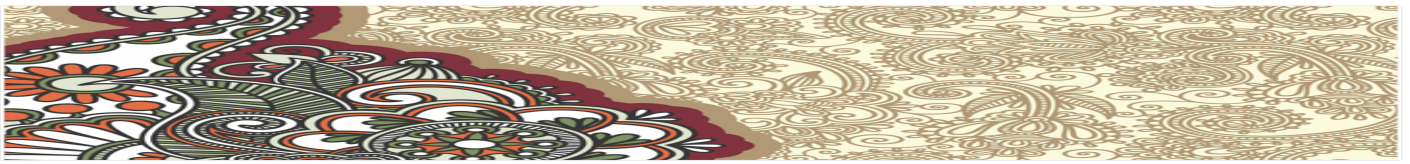
Semua indikator kinerja kegiatan yang diukur melalui persentase, diakumulasikan nilai agregat/komposit

Penajaman pengukuran Indikator kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1.2) Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku ditujukan untuk menindaklanjuti hasil reviu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020. Sehingga, formula pengukuran pada IKSS-1.2 tersebut menjadi:

Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan berlaku yang diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan – Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil

Jumlah Keseluruhan Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan

Berdasarkan perubahan formula pengukuran IKSS-1.2 tersebut diatas, maka TA 2021, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu

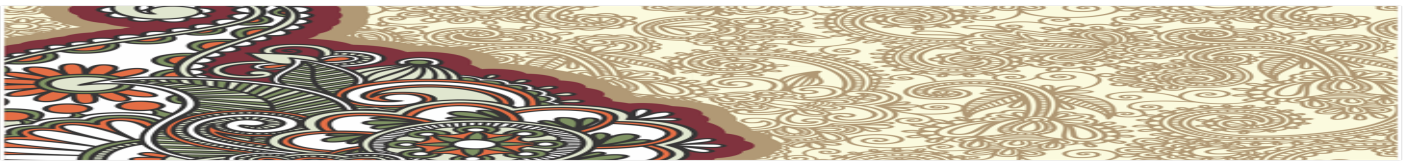


Persentase Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Kepastian Hukum Persaingan Usaha Untuk Menjamin Iklim Investasi Yang Sehat Dengan Advokasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Yang Sehat yaitu capaian kinerja sebesar 117% atau dengan realisasi sebesar 100% dengan target 85% sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021  
(Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	85%	100%

Berdasarkan data litigasi TA 2021 pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, maka terdapat 2 (dua) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian dalam Lampiran II, bahwa terdapat 2 (dua) Putusan KPPU dinyatakan batal/kalah di tingkat Mahkamah Agung berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Hasil amar putusan menerangkan bahwa batal/kalahnya didasarkan karena substansi perkara, bukan karena berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian hukum acara di KPPU yang tidak sesuai peraturan (formil/hukum acara). Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil perhitungan IKSS-1.2 sebagai berikut:



= Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan berlaku yang diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan – Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil

---

Jumlah Keseluruhan Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan

$$\begin{aligned} &= 17 - 0 \\ &\frac{\quad}{17} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penjabaran penghitungan diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kedua pada Sasaran Strategis (SS-1.2) Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi dengan capaian kinerja sebesar 117% atau terealisasi sebesar 100% dengan target 85%

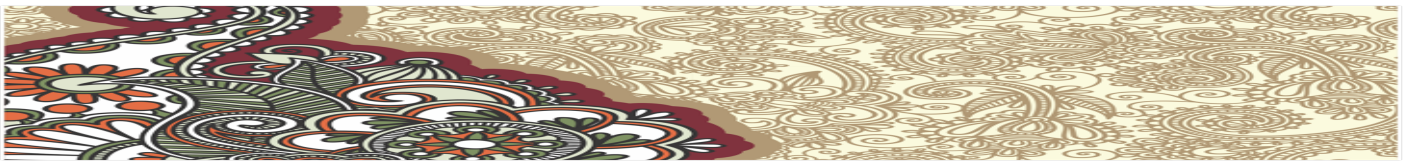
Rekapitulasi data litigasi TA 2021 pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, maka terdapat 2 (dua) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian yang dapat dilihat pada Lampiran II.

## **2. Terwujudnya Kualitas Layanan Manajemen Baik Internal maupun Eksternal Melalui *e-Government***

### **2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)**

Uraian kinerja atas 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (2.1) untuk Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*. Pada Tahun 2021 belum dilakukan pengukuran indeks *e-government* berdasarkan pemanfaatan dari percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, serta kepastian waktu dan keamanan data, sehingga formula penghitungan adalah sebagai berikut:





Rata-rata dari penghitungan nilai IKK\* Eselon II pada Sekretariat Jenderal pada tahun berjalan

Terdapat perbaikan pada IKSS 2.1 sesuai dengan reviu dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020, sehingga formula pengukuran pada IKSS-2.1 tersebut menjadi:

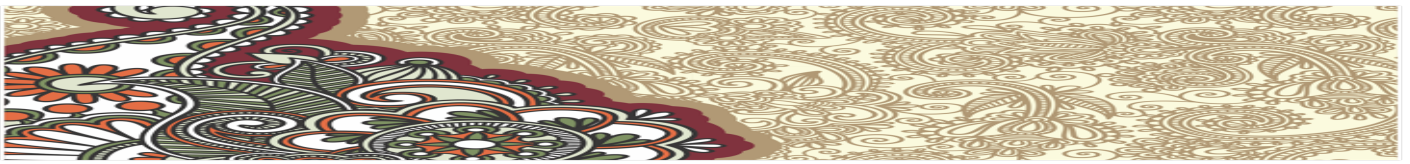
Rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada eselon II dilingkungan Sekretariat Jenderal.

\*Nilai indeks tersebut dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, sehingga akan mendapatkan target nilai indeks ISS TA 2021.

Berdasarkan perubahan formula pengukuran IKSS-2.1 tersebut diatas, maka pada TA 2021 hasil perhitungan rata-rata nilai konversi realisasi nilai IKK terkait layanan Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal yang akan menjadi nilai IKSS-2.1: Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) untuk mencapai Sasaran Strategis (SS-2) yaitu Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government* yaitu tercapai kinerja 98% atau dengan terealisasi poin nilai sebesar 76 dengan target 78 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021  
(Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	78	76



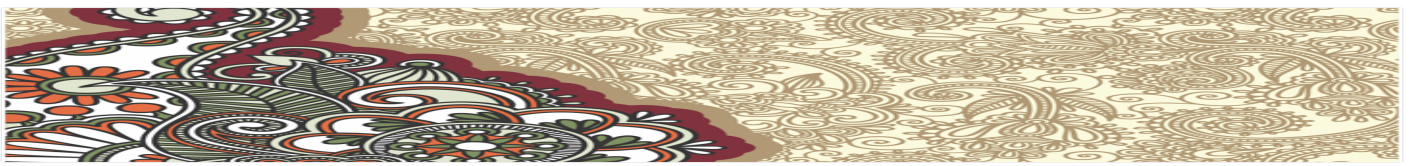
Pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* melalui formula pengukuran yaitu rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada eselon II dilingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai IKK terkait layanan pada Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal terdapat 12 (dua belas) IKK dengan nilai Indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia
2. Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia
3. Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN
4. Indeks kepuasan layanan umum
5. Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan
6. Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah
7. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran
8. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-5)
9. Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)
10. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional
11. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi
12. Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik

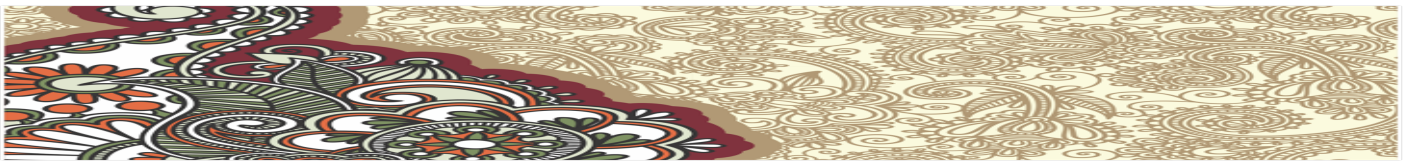
Selanjutnya dari data realisasi nilai indeks dari 12 (dua belas) IKK terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, dengan data konversi yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2021

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2021 (skala 1-7)	Realisasi 2021 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
1	Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia (skala 1-7)	Indeks	4.10	5.70	78.55
2	Indeks pemahaman pegawai mengenai	Indeks	4.10	6.00	83.50



No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2021 (skala 1-7)	Realisasi 2021 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
	peraturan Sumber Daya Manusia (skala 1-7)				
3	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)	Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan RKBMN	4.70	5.50	75.25
4	Indeks kepuasan layanan umum (skala 1-7)	Indeks layanan	4.70	5.06	67.99
5	Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1-7)	Indeks layanan	4.70	6.08	84.82
6	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)	Indeks layanan	4.70	5.06	67.99
7	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)	Indeks	4.70	6.17	86.31
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-5)	Indeks	3.60	6.11	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-7)	Indeks	4.90	6.11	85.23
9	Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)	Indeks	230	313	
	Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-7)	Indeks	3.13	3.90	48.85
10	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)	Indeks	4.0	6.20	86.80
11	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)	Indeks	4.0	5.03	67.50
12	Indeks kepuasan	Indeks	4.0	6.06	84.49



No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2021 (skala 1-7)	Realisasi 2021 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
	kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)				
	<b>Nilai Rata-Rata Konversi dari Nilai IKK</b>				<b>76.44</b>

Sumber: KPPU, data 2021 diolah

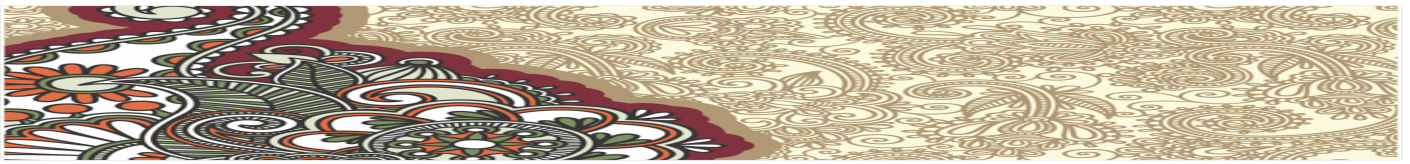
Sejalan dengan adanya perbaikan formula Indikator Kinerja Sasaran Startegis (IKSS-2.1), maka dilakukan konversi terhadap 12 Nilai Indeks data capaian IKK sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5 diatas. Pada nilai indeks untuk IKK: Indeks Keamanan Informasi yang terealisasi sebesar 48,85 (konversi) belum menunjukkan angka indeks yang baik. Dari hasil IKK: Indeks Keamanan Informasi yaitu analisa hasil evaluasi akhir perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) melalui penilaian mandiri dimana nilai Indeks KAMI menunjukkan level Status: “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar”. Untuk menaikan poin nilai KAMI pada level status ini maka KPPU perlu menyiapkan instrumen kebijakan, prosedur, rencana program peningkatan keamanan informasi.

## B. ANALISIS EFISIENSI

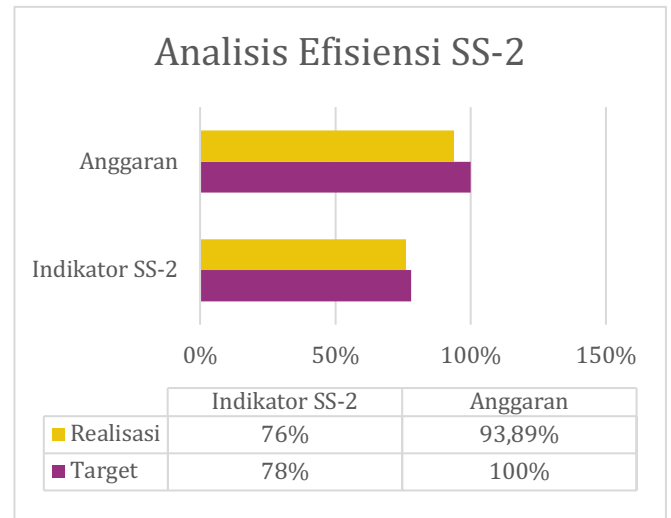
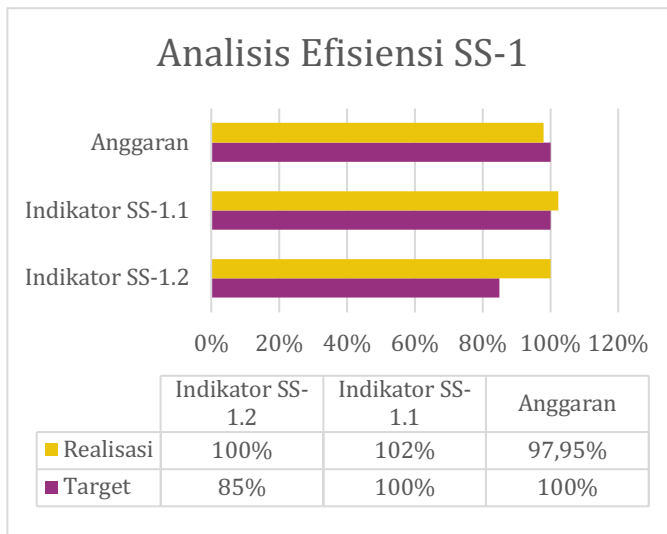
Pada Tahun 2021, pencapaian Sasaran Strategis KPPU untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha TA 2021 yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja SS-1 lebih dari 100%, sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 32.811.483.113,- dari total anggaran sebesar Rp 33.498.875.000,- (97,95%)
2. Capaian Indikator Kinerja SS-2 kurang dari 100%, sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 35.962.954.571,- dari total anggaran sebesar Rp 38.303.550.000,- (93,89%).

Dalam SS-2 ini, terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 44.120.992.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 96,22% atau sebesar Rp 42.452.322.044,-, dan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 25.367.205.000,- dengan realisasi sebesar 99,50% atau sebesar Rp 25.240.969.726,-.



Berikut adalah Analisis Efisiensi untuk masing-masing Sasaran Strategis:



Sumber: KPPU, data 2021 diolah

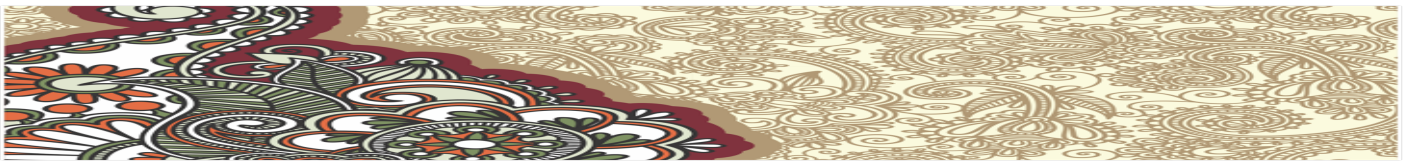
Gambar 3.3 Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2

Rekapitulasi perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	1.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha	4.5	4.5	4.7	4.81
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	111%	85%	100%
2.	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government	2.1. Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government	75	103	78	76

Sumber: KPPU, data 2021 diolah



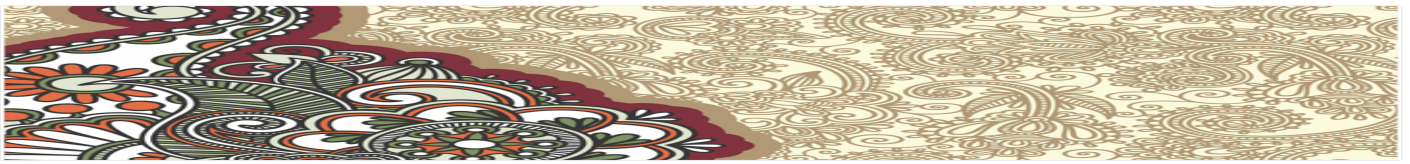
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.6 di atas bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020 dan tahun 2021, pada IKSS 1.2 dan 2.1 sudah dapat dibandingkan karena sama-sama menggunakan Renstra 2020-2024.

Selanjutnya IKSS 1.1 jika dibandingkan capaian pada tahun 2020 terhadap 2021 mengalami peningkatan nilai indeks baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional tahun 2021 termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Pada tahun 2021, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,81 atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4,65. Pandemi Covid- 19 diduga tidak lagi berpengaruh secara signifikan pada tahun 2021 karena skor dimensi permintaan dan dimensi penawaran yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebagai dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik. Kedua dimensi tersebut memiliki kontribusi sekitar 33% terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Indeks Persaingan Usaha Tahun 2021 dan 2020

Dimensi	Tahun 2021		Tahun 2020	
	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP
Struktur	4.49	4.49	4.34	4.34
Perilaku	3.73	3.73	3.58	3.58
Kinerja	4.86	4.86	4.86	4.86
Regulasi	6.30		6.12	
<i>Demand</i>	4.15		4.06	
<i>Supply</i>	5.16		4.94	
Kelembagaan	4.96		4.61	
<b>Skor Bobot Sama</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>	<b>4.65</b>	<b>4.26</b>
<b>Skor PCA</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>	<b>4.50</b>	<b>4.39</b>

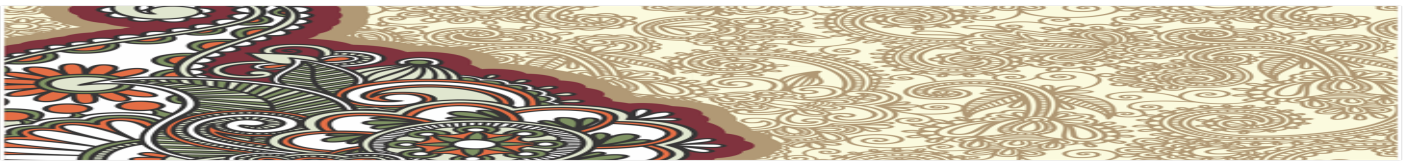
Perhitungan kinerja tersebut di atas didasarkan pada capaian output yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja (Renja/RKP) Tahunan khususnya TA 2021. Penjelasan capaian output kegiatan (dalam bentuk *matrix table*) pada Program Pengawas Persaingan Usaha TA 2021 dijelaskan pada Lampiran II pada Laporan Kinerja ini.



Disamping itu untuk IKSS 1.2 dan IKSS 2.1 mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan Tahun 2020 dengan tahun 2021. Hal itu disebabkan karena adanya perbaikan dan perubahan formula perhitungan terhadap kedua indikator tersebut. Pada IKSS 1.2 dilakukan perubahan atas dasar reviu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020, sedangkan untuk IKSS 2.1 juga dilakukan perubahan berdasarkan reviu dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) KPPU terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020.

Selanjutnya untuk upaya-upaya penting yang telah dilakukan KPPU dalam tahun 2021 ditujukan untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan dalam analisis efisiensi di atas. Pada pelaksanaannya terdapat penyesuaian format kegiatan akibat dari adanya Pandemi Covid-19. Beberapa catatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan 2 (dua) Peraturan KPPU sebagai tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) memberikan dampak pada perluasan tugas dan fungsi KPPU terkait kemitraan dan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dua Peraturan KPPU tersebut adalah:
  - a. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Pemenuhan pencapaian *output* yang dilakukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah dengan mengalihkan proses investigasi, persidangan dan sosialisasi menjadi *online* (dengan penerbitan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik, yang dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan format kegiatan pada kondisi Pandemi Covid – 19)
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan *online*.
4. Penyusunan target dilakukan dengan melihat kesesuaian antara upaya pencapaian target dengan perubahan format kegiatan.



5. Koordinasi antara KPPU di pusat dan di daerah dilaksanakan secara efektif dan *hybrid* secara intensif untuk meningkatkan peran dan kontribusi kantor wilayah.

Upaya tersebut di atas adalah bagian dari akuntabilitas kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha sebagai Indikator Kinerja Utama KPPU dengan hasil indeks sebesar 4.81. Pada tahun 2021 KPPU juga menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan KPPU dari tahun 2012 sampai dengan 2020.

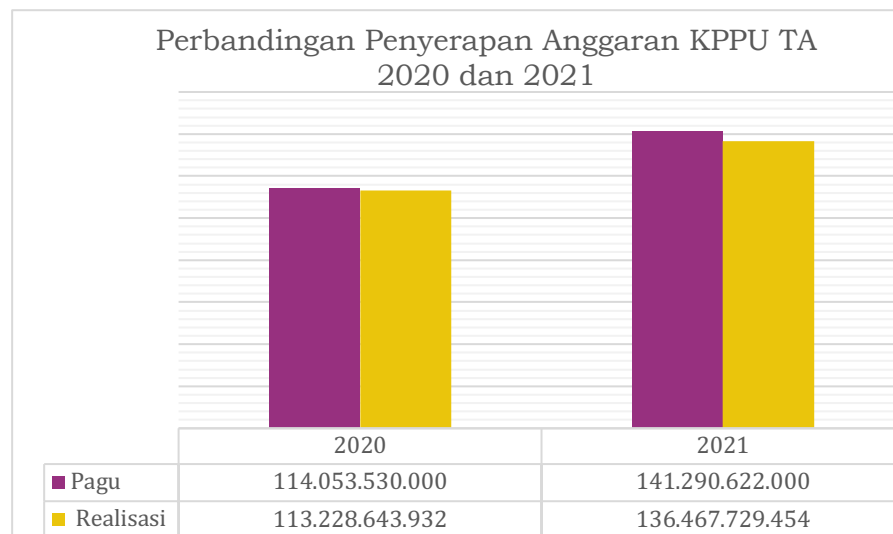
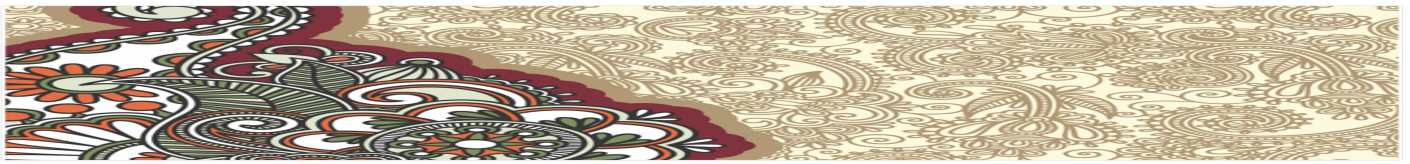
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, KPPU akan:

1. Melakukan penyiapan dasar hukum dan perbaikan dasar yang ada di KPPU dalam rangkaantisipasi dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
2. Melakukan penyesuaian dan pemberlakuan tata cara yang baru untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.
3. Melakukan penambahan ketentuan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kondisi KPPU sebagai Lembaga non struktural.
4. Melakukan pencapaian output secara efisien dengan menyusun kembali alur Koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif untuk mencari solusi dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga.
6. Melakukan penataan Manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi anggaran pada 2 (dua) program, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen pada TA 2021 sebesar Rp 136.467.729.454,- atau mencapai 96,59% dari total pagu sebesar Rp 141.290.622.000,-. Persentase realisasi ini menurun ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 realisasi anggaran mencapai 99,28% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 113.228.643.932,- dari total pagu sebesar Rp 114.053.530.000,-. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2021 dan 2020 sebagaimana terlihat dalam Grafik berikut.





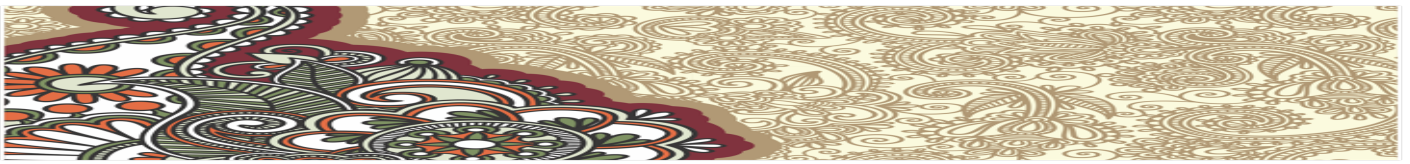
Sumber: KPPU, data 2021 diolah

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU TA 2021 dan TA 2020

Pemanfaatan anggaran KPPU TA 2021 untuk melaksanakan SS-1 sebesar Rp 32.811.483.113,- atau 45,70% dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja operasional dan belanja pegawai). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPU dalam lingkup SS-1 adalah kegiatan utama (*core*) yang juga memerlukan Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi. Sedangkan kondisi struktur Anggaran selain untuk melaksanakan SS-1, juga ada SS-2 yang masuk kedalam anggaran *supporting* yang pada tahun 2021 adalah sebesar 50,09% atau Rp 35.962.954.571,- dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja operasional dan belanja pegawai). Perbandingan Alokasi Anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2021

Sasaran Strategis/Program		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>			
	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai	33.498.875.000	32.811.483.113	97,95%



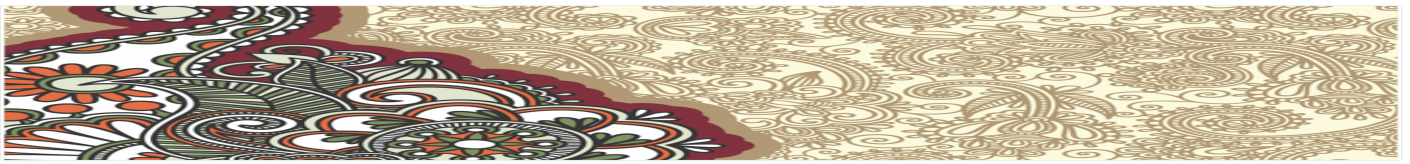
Sasaran Strategis/Program		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	persaingan usaha			
<b>2</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	38.303.550.000	35.962.954.571	93,89%
	Belanja Operasional			
	Belanja Pegawai	44.120.992.000,-	42.452.322.044	96,22%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	25.367.205.000,-	25.240.969.726	99,50%
<b>Total</b>		<b>141.290.622.000,-</b>	<b>136.467.729.454</b>	<b>96,59%</b>

# BAB IV

# Penutup

KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA  
TA 2021





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN**

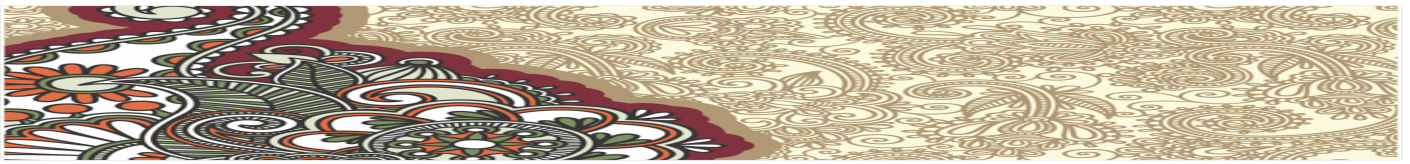
Kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*) akhir dari berbagai proses dan output yang telah dilakukan pada Tahun 2021 adalah angka pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha. Indeks tersebut digunakan KPPU untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan target pencapaiannya yang telah dicantumkan dalam Renstra KPPU 2020 - 2024. Penentuan angka Indeks juga sejalan dengan tujuan KPPU yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPU Tahun 2021 menjelaskan data dan fakta keberhasilan capaian target kinerja KPPU, tantangan yang dihadapi serta kendala dalam mencapai sasaran strategis KPPU Tahun 2021. Peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dan akan berlaku sampai dengan akhir tahun 2024.

Capaian kinerja KPPU Tahun 2021 pada masing-masing Indikator Kinerja khususnya SS-1 sesuai dengan target yang ditentukan, namun pada SS-2 terdapat kendala dalam memenuhi target yang ditentukan. Data capaian menunjukkan bahwa pada SS-1 terlampaui capaiannya lebih dari 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran untuk SS-1 adalah 97,95%, dan pada SS-2 capaiannya sebesar 98% dengan realisasi anggarannya 93,89%.

Prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU diimplementasikan dengan melakukan format baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya dengan menggabungkan format kegiatan *offline* dan *online (hybrid)*. Hanya saja, pelaksanaan format demikian menjadi kendala pada beberapa kegiatan sehingga penyesuaian dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan *online* menjadi prioritas utama dalam upaya pencapaian kinerja di Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih harus dihadapi KPPU yang berimbas pada besaran anggaran dan besaran output yang menurun di awal tahun 2021 dibandingkan dengan output tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 terdapat pergerakan anggaran yang sangat dinamis, sehingga



pada akhir tahun 2021 KPPU mencatatkan angka anggaran tertinggi sejak tahun 2008 dengan rincian output terbanyak jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

## **B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA**

Pada Tahun 2021, KPPU telah berhasil menghadapi tantangan dan kendala dalam upaya pencapaian target baik untuk penegakan hukum maupun untuk advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini memperkuat peran KPPU dalam konteks kontribusi KPPU pada Prioritas Nasional, terutama pada Prioritas Nasional (PN) kesatu yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Saat ini, Indeks Persepsi Persaingan Usaha telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah. Tinggi rendahnya angka indeks menjadi penentu tingkat persaingan usaha di daerah tersebut. Mencermati hal tersebut, maka KPPU akan memfokuskan pada penguatan nilai – nilai persaingan usaha yang sehat untuk berbagai sektor strategis di Indonesia.

Langkah – langkah strategis yang akan dilaksanakan KPPU pada sisa periode Renstra khususnya pada TA 2022 adalah:

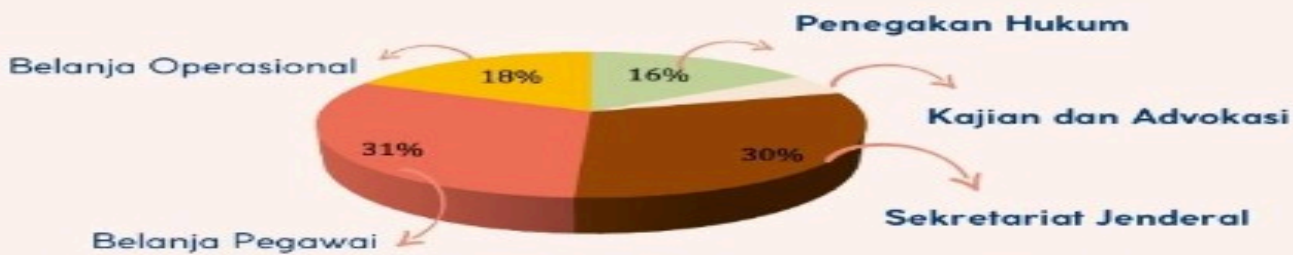
1. Pencapaian output secara efisien dengan membakukan alur koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga.
2. Implementasi yang tepat strategi komunikasi dan koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi dalam bersinergi untuk kebijakan terkait persaingan usaha
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan melanjutkan proses alih status yang diawali dengan penataan manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah.
4. Pengukuran indeks *e-government* yang terdiri dari percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, serta kepastian waktu dan keamanan data dilakukan pada TA 2023-2024. Sedangkan instrument pengukurannya akan disusun pada TA 2022.

# AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi Anggaran dan Efisiensi KPPU

## PAGU ANGGARAN

**Rp. 141.290.622.000,-**



REALISASI

**96,59%**

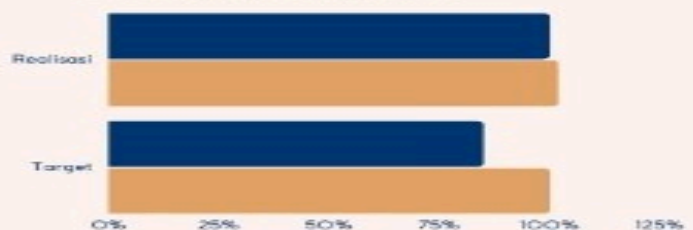
**RP. 136.467.729.454,-**

### EFISIENSI

Capaian pada Sasaran Strategis > 100%  
sedangkan Realisasi Anggaran < 100%

### KINERJA KEPASTIAN HUKUM DAN ADVOKASI

SASARAN STRATEGIS KESATU - KPPU



### LAYANAN E-GOVERNMENT

SASARAN STRATEGIS KEDUA - KPPU

Capaian target dengan konversi indeks pada layanan manajemen



# KINERJA KPPU

Terdapat 2 Sasaran Strategis untuk mengukur kinerja KPPU

1

## INDEKS PERSEPSI PERSAINGAN USAHA



## PROSES PENEGAKAN HUKUM

### CAPAIAN KPPU PADA 2021

Data menunjukkan capaian kinerja pada Sasaran strategis : Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat

Capaian Indeks Persepsi Persaingan Usaha TA 2021

**4,81**

Penyelesaian Proses Penegakan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku

**100%**

2

## LAYANAN MANAJEMEN MELALUI E-GOVERNMENT

mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan e-government

**76**

skala 1 - 100

Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data.

## 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2021



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PERIODE TRIWULAN IV TA 2021)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

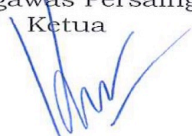
Nama : Ukay Karyadi

Jabatan : Ketua KPPU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Februari 2022  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

  
Ukay Karyadi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(PERIODE TRIWULAN IV TA 2021)

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> <b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja SS</b>	<b>Target 2021</b>
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)	4.7 skala 1-7
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	85%
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> <b>Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government</b>		
1	Indeks tingkat efektifitas pemanfaatan e-government (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)	78 skala 1-100

**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

108.WA. Program Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp 33.498.875.000,-

Rp 107.791.747.000,-

Jakarta, Februari 2022  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

Ukay Karyadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(PERIODE TRIWULAN IV TA 2021)

<b>Program:</b> <b>Pengawasan Persaingan Usaha</b>		
<b>Sasaran Program #1/2 :</b> <b>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2021</b>
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999	4.0 skala 1-7
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP 17 Tahun 2013	4.0 skala 1-7

**Program**  
108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**  
Rp 6.539.071.000,-

Jakarta, Februari 2022  
Deputi Bidang Kajian dan Advokasi



Taufik Ariyanto


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(PERIODE TRIWULAN IV TA 2021)

<b>Program: Pengawasan Persaingan Usaha</b>		
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2021</b>
1	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	21%
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	100%
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	75%
4	Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	80%
5	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	90%
6	Indeks Layanan Kepaniteraan (skala 1-7)	3.25 skala 1-7

**Program**  
108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**  
Rp 22.512.875.000,-

Jakarta, 2 Februari 2022  
Deputi Bidang Penegakan Hukum

  
Setyabudi Yulianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(PERIODE TRIWULAN IV TA 2021)

<b>Program: Dukungan Manajemen</b>		
<b>Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2021</b>
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	62 Skala 1-100
2	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	80%
3	Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government (dari 5 target)*  *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis e-government dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan , sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra ada 5 (lima) sistem SDM berbasis e-government diimplementasikan	2 sistem
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2021</b>
1	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	85%
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)	4.7 skala 1-7
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1- 7)	4.7 skala 57
4	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	230 (skala 1-645)
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (skala 1-7)	4.0 skala 1- 7
6	Indeks Layanan Hukum (skala 1-7)	4.0 skala 1- 7
7	Tingkat Maturitas SPIP (skala 1-5)	Level 3 skala 1-5
8	Opini BPK atas laporan keuangan KPPU	WTP

**Program**

108.WA. Dukungan Manajemen

**Kegiatan**

3955. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU

**Anggaran**

Rp 107.791.747.000,-

Rp 4.446.929.000,-

Jakarta, 11 Februari 2022  
Sekretaris Jenderal

Charles Pandji Dewanto

## 2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024



### Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 22 /KPPU/Kep.1/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Program pada unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 21 /KPPU/Kep.1/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi	
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>	
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PENJELASAN TARGET  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) #1/2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>						
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

## 1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2021 (Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	Indeks	4.7	4.81	102%	●
1.2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	85%	100%	117%	●
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	Indeks	78	76	97%	●

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target

## 2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2021

### Kerangka dasar penyusunan Indeks Persaingan Usaha

Konsep atau paradigma yang digunakan sebagai kerangka dasar penyusunan indeks persaingan usaha adalah paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan



memfasilitasi monopoli. Dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

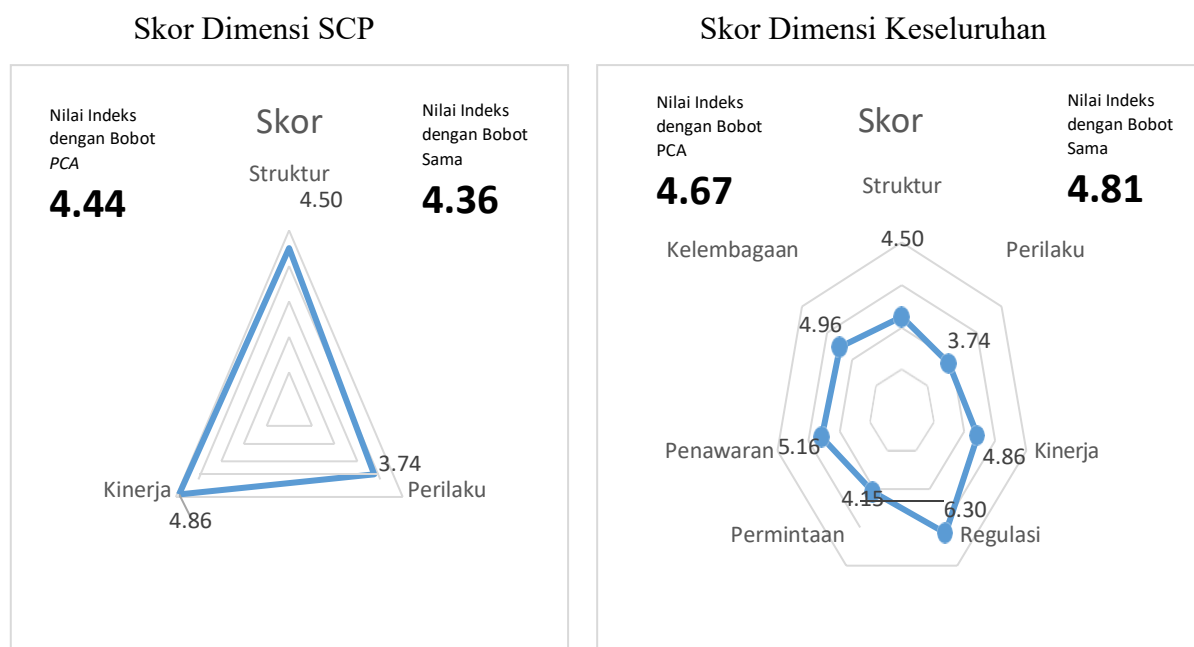
Penelitian ini melakukan survei terhadap 34 provinsi dengan responden Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan baik bobot sama maupun bobot dari *principal component analysis*. Proses penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan metode *Additive Aggregation Method (AAM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun 2021, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,81 atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4,65. Pandemi Covid-19 diduga tidak lagi berpengaruh secara signifikan pada tahun 2021 karena skor dimensi permintaan dan dimensi penawaran yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebagai dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik, hal itu dijelaskan pada Tabel 1. Kedua dimensi tersebut memiliki kontribusi sekitar 33% terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Tabel 1  
Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dimensi	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP
Struktur	4.34	4.34	4.49	4.49
Perilaku	3.58	3.58	3.73	3.73
Kinerja	4.86	4.86	4.86	4.86
Regulasi	6.12		6.30	
<i>Demand</i>	<b>4.06</b>		4.15	
<i>Supply</i>	<b>4.94</b>		5.16	
Kelembagaan	4.61		4.96	
Skor Bobot Sama	<b>4.65</b>	<b>4.26</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>
Skor PCA	<b>4.50</b>	<b>4.39</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>

Pada Gambar 1 menunjukkan indeks persaingan usaha nasional berdasarkan rata-rata indeks persaingan usaha daerah dan seluruh sektor ekonomi. Dari hasil tersebut terlihat bahwa indeks persaingan usaha berada di rentang 4.36-4.81 berdasarkan dimensi SCP maupun dimensi keseluruhan baik menggunakan bobot PCA maupun bobot yang sama. Berdasarkan dimensi SCP, persaingan usaha dikategorikan ke dalam persaingan usaha moderat. Persaingan usaha dikategorikan menjadi persaingan usaha sedikit tinggi ketika menggunakan dimensi secara keseluruhan. Kemudian aspek perilaku merupakan dimensi yang dipersepsikan memiliki skor paling kecil yaitu 3.74 atau kurang dari 4. Dimensi struktur juga memiliki skor 4.50. Masalah struktur dan perilaku industri menjadi faktor yang mendorong indeks persaingan usaha ke arah moderat pada dimensi SCP. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi KPPU dan pengambil kebijakan untuk mendorong agar struktur industri menjadi tidak terkonsentrasi dan perilaku industri yang lebih kompetitif baik di daerah maupun di nasional.

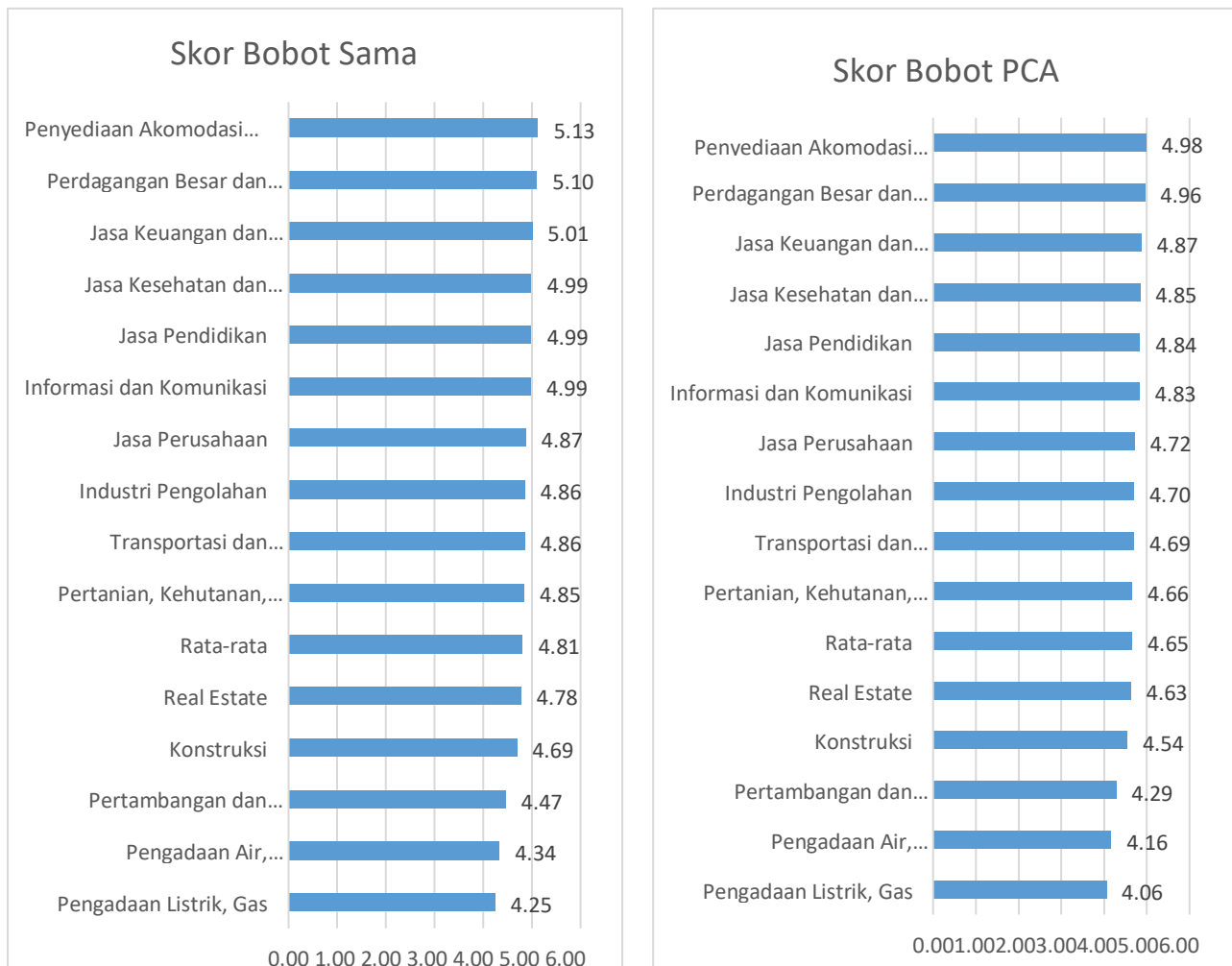


Gambar 1 Indeks Persaingan Usaha Nasional

### **Indeks Persaingan Usaha Sektoral**

Terdapat 11 sektor yang berada di atas rata-rata indeks dan 4 sektor yang berada dibawah rata-rata indeks. Berdasarkan kategori yang ada, indeks persaingan usaha sektoral hanya memiliki 2 kategori yakni berada dalam kategori sedikit tinggi dan moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang memiliki persaingan yang sangat tinggi dan cukup tinggi, serta tidak terdapat juga sektor dengan persaingan yang sedikit rendah, cukup rendah dan sangat rendah. Sektor-sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha di atas rata-rata (menggunakan bobot sama dan PCA) di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa perusahaan; jasa kesehatan,

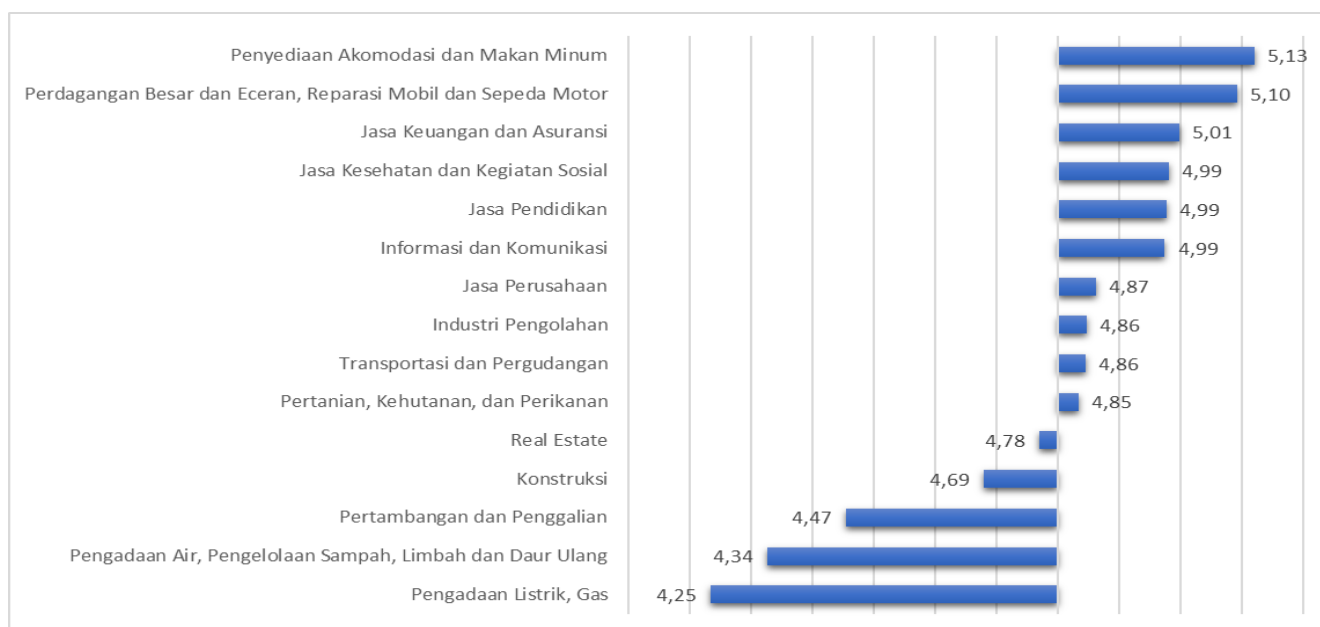
industri pengolahan, informasi dan komunikasi, pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sektor-sektor yang berada konsisten di bawah nilai rata-rata adalah sektor *real estate*; konstruksi; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan; pengadaan listrik dan gas. Hasil indeks persaingan usaha secara sektoral dapat dilihat pada Grafik 1 sebagai berikut:



Grafik 1 Indeks Persaingan Usaha Sektoral

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Restoran. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 5.13 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 5.11. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan

air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.



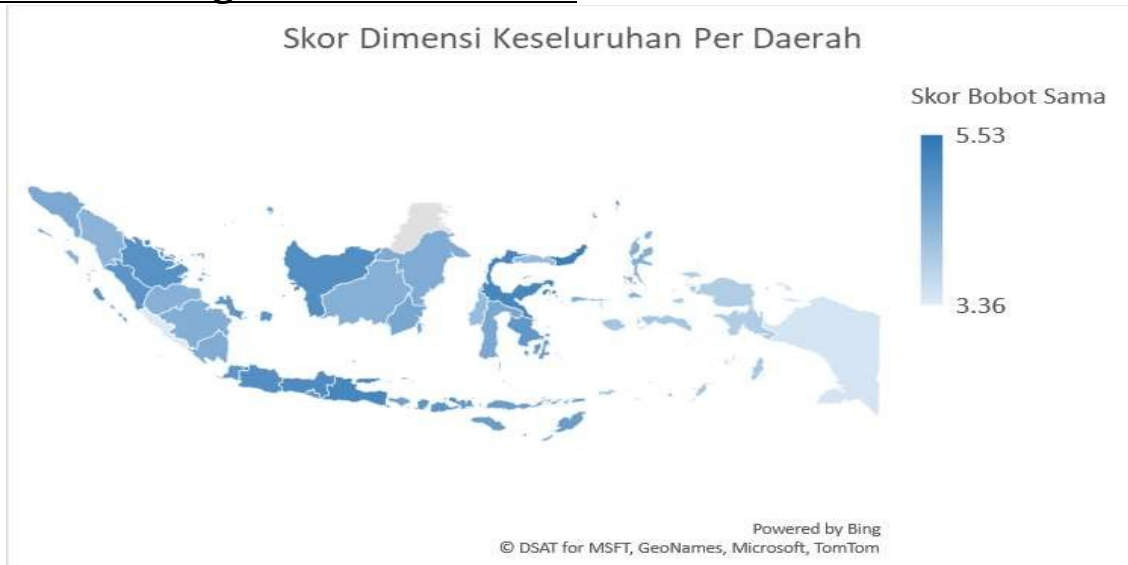
Sumber: Laporan IPU 2021 (diolah)

Gambar 2 Indeks Persaingan Usaha 15 Sektor Ekonomi Tahun 2021

Sektor-sektor ekonomi yang memiliki persaingan tinggi berdasarkan IPU adalah Sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Informasi dan Komunikasi.

Adapun sektor-sektor ekonomi yang memiliki persaingan usaha rendah adalah: Sektor Pertambangan & Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Pengadaan Listrik, Gas. Sektor ekonomi akan mendapatkan perhatian dari KPPU untuk mengetahui penyebab persaingan usaha di sektor ekonomi tersebut rendah dan apakah terdapat hambatan yang menyulitkan masuknya pemain baru dalam industri.

## Indeks Persaingan Usaha Per Daerah



Gambar 3 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

Pada Gambar 3 dan Grafik 3 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha berdasarkan provinsi berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat. Dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

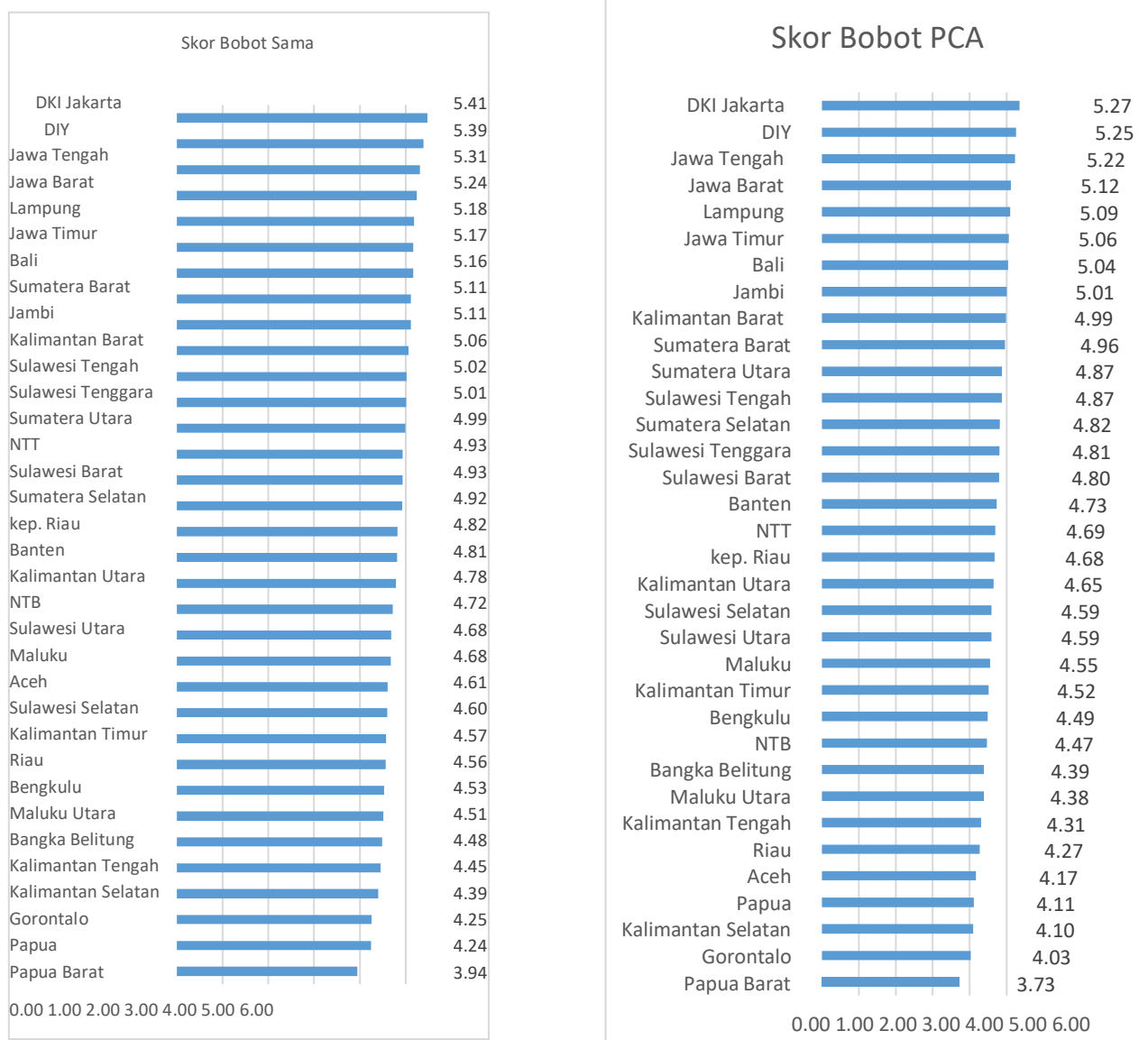
- Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)  
Tidak terdapat provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA.
- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)  
Terdapat 29 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi di luar provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua dan Papua Barat.
- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)  
Terdapat sekitar 6 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua dan Papua Barat
- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)  
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah
- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang

terkategori dalam persaingan cukup rendah

- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)

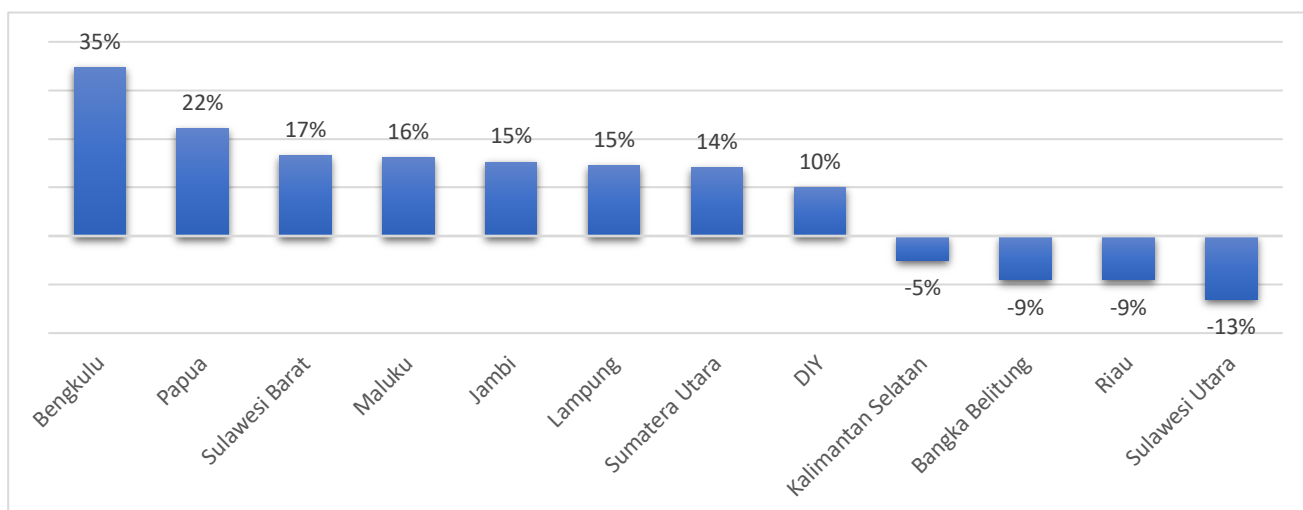
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memiliki kesimpulan yang sedikit berbeda dengan skor indeks persaingan usaha seluruh dimensi dan bobot sama. Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang termasuk ke dalam persaingan cukup tinggi menjadi berkurang 5 provinsi menjadi 24 provinsi.



Grafik 3 Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot sama.

Jika dilihat dari sebaran provinsi, sepuluh provinsi tertinggi persaingan usahanya masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa terkecuali provinsi Banten. Untuk daerah di luar pulau Jawa termasuk dalam sepuluh besar adalah: Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sepuluh provinsi terendah adalah: Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Sumber: Laporan IPU 2021 (diolah)

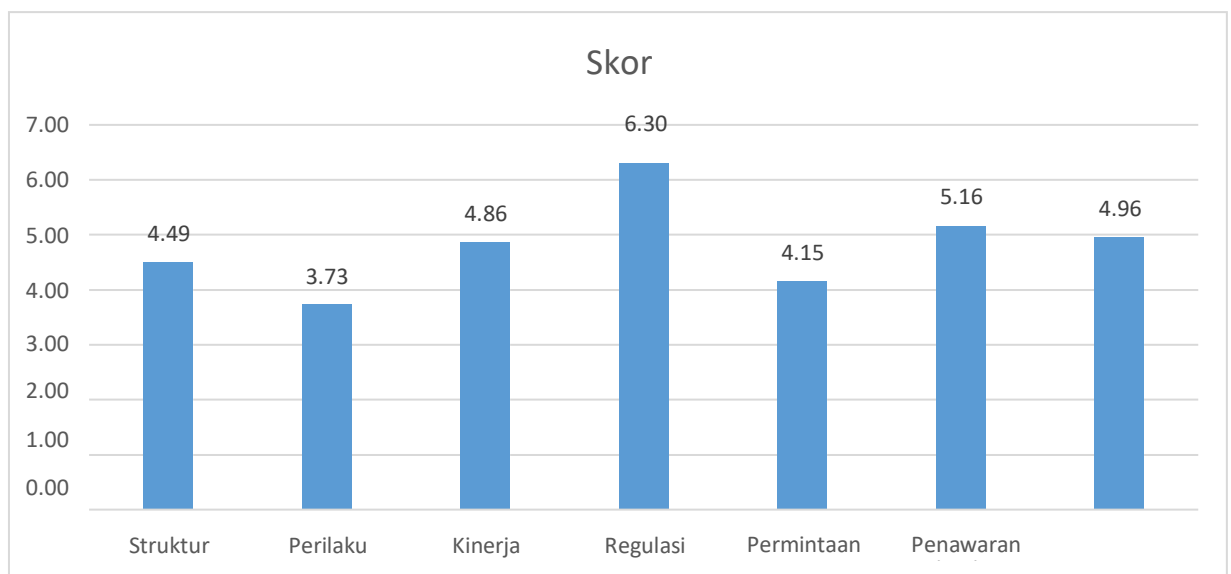
Gambar 4 Perkembangan Indeks Persaingan Usaha Tahun 2021

Terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan signifikan IPU pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Provinsi tersebut adalah Provinsi Bengkulu, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DI. Yogyakarta. Khusus untuk provinsi Lampung dan Provinsi DI. Yogyakarta, salah satu sumbangan kenaikan IPU adalah dikarenakan adanya keberadaan Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU yang baru dibuka pada tahun 2020-2021.

Terdapat pula beberapa provinsi yang mengalami penurunan IPU yang cukup besar yakni: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi ini akan menjadi perhatian bagi KPPU pada tahun 2022 untuk dapat memperbaiki IPU pada tahun 2022.

### **Indeks persaingan usaha Per Dimensi**

Jika dilihat dari masing-masing dimensi (Grafik 4), dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi terkecil dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.50, 3.74 dan 4.86. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat menguasai pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan *output* dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dari sisi pasar, dimensi permintaan dan penawaran memiliki indeks yang juga tidak cukup tinggi untuk mengarahkan pada persaingan yang tinggi. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.30, yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.



Grafik 4 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha



### 3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga TA 2021

No	Nomor Putusan KPPU	Perkara	Pengadilan	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	10/KPPU-I/2018	Tender RSUD Makassar	Mahkamah Agung	31 Maret 2021	Menang
2	03/KPPU-I/2020	Semen Conch	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	1 April 2021	Menang
3	05/KPPU-I/2020	Tender Kolam Renang	Pengadilan Niaga Surabaya	5 April 2021	Menang
4	30/KPPU-I/2019	Tender Halmahera	Pengadilan Negeri Ternate	6 April 2021	Menang
5	19/KPPU-M/2020	Akuisisi Centurion (Pp)	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	7 April 2021	Menang
6	23/KPPU-L/2018	Tender Sibolga	Mahkamah Agung	1 April 2021	Kalah, secara substansi
7	14/KPPU-L/2018	Tender Stabat-Sumut	Pengadilan Negeri Medan	27 April 2020	Menang
8	13/KPPU-I/2019	Grab	Mahkamah Agung	1 April 2021	Kalah, secara substansi
9	16/KPPU-I/2016	Tender Skoi	Mahkamah Agung	4 Mei 2021	Menang
10	04/KPPU-L/2020	Tender Rsud Langsa	Pengadilan Niaga Medan	22 Juni 2021	Menang
11	19/KPPU-M/2020	Semen Conch	Mahkamah Agung	4 Agustus 2021	Menang
12	03/KPPU-I/2020	Akuisisi Centurion (Pp)	Mahkamah Agung	12 Agustus 2021	Menang
13	08/KPPU-L/2018	Freight Container	Mahkamah Agung	8 September 2021	Menang
14	14/KPPU-L/2019	Tender Spam Lampung	Mahkamah Agung	15 November 2021	Menang
15	30/KPPU-L/2019	Tender Halmahera	Mahkamah Agung	4 November 2021	Menang
16	05/KPPU-I/2020	Tender Kolam Renang	Mahkamah Agung	17 November 2021	Menang
17	06/KPPU-L/2020	Umroh	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	10 Desember 2021	Menang

**4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2021 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional**

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode (KRO/RO)	Output (KRO/RO)		Satuan
					Target		
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>							
3952	Direktorat Ekonomi	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>	<b>2,331,329,000</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2,331,329,000	PBB	6	Rekomendasi Kebijakan	
			2,122,158,000	PBB.001	5	Rekomendasi Kebijakan	
			209,171,000	PBB.002	1	Rekomendasi Kebijakan	
5162	Direktorat Kebijakan Persaingan	<b>Analisis Kebijakan Pemerintah</b>	<b>1,884,022,000</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,778,732,000	PBB	8	Rekomendasi kebijakan	
			1,058,166,000	PBB.001	4	Rekomendasi kebijakan	
			175,526,000	PBB.002	2	Rekomendasi kebijakan	
			545,040,000	PBB.003	2	Rekomendasi kebijakan	
		(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	105,290,000	UAB	1		
			105,290,000	UAB.001	1	Sistem Informasi	
		5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>	<b>2,323,720,000</b>		
(PEB) Forum	105,000,000			PEB	2	Forum	
	105,000,000			PEB.001	2	Forum	
(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	212,180,000			QDB	2	Lembaga	
	161,076,000			QDB.001	1	Lembaga	
	51,104,000			QDB.002	1	Lembaga	
(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,006,540,000			QDH	19	Badan Usaha	
	689,426,000			QDH.001	10	Badan Usaha	

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode (KRO/RO)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
			1,317,114,000	QDH.002	9	Badan Usaha
3953	Direktorat Pengawasan Kemitraan	<b>Pengawasan Kemitraan</b>	<b>2,714,008,000</b>			
		(QCE) Penanganan Perkara	2,714,008,000	QCE	13	Perkara
			1,047,135,000	QCE.001	4	Perkara
			113,544,000	QCE.002	1	Perkara
			865,197,000	QCE.003	4	Perkara
			688,132,000	QCE.004	4	Perkara
3958	Direktorat Merger	<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>	<b>3,421,969,000</b>			
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	327,607,000	QCD	2	Perkara
			327,607,000	QCD.002	2	Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2,773,262,000	QIH	52	Badan Usaha
			1,345,329,000	QIH.001	26	Badan Usaha
			1,427,933,000	QIH.002	26	Badan Usaha
		(RAH) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	321,100,000	RAH	1	Unit
			321,100,000	RAH.001	1	Unit
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>	<b>4,283,500,000</b>			
		(QCE) Penanganan perkara	4,283,500,000	QCE	53	Perkara
			1,738,425,000	QCE.001	28	Perkara
			865,702,000	QCE.002	7	Perkara
			1,529,373,000	QCE.003	16	Perkara
			150,000,000	QCE.004	2	Perkara

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode (KRO/RO)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>	<b>3,202,545,000</b>			
		(QCE) Penanganan Perkara	3,202,545,000	QCE	28	Perkara
			564,698,000	QCE.001	4	Perkara (Pemberkasan)
			1,555,083,000	QCE.002	14	Perkara (Penuntuan)
			1,082,764,000	QCE.003	10	Perkara (Litigasi)
5275	Kepaniteran	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>	<b>8,890,853,000</b>			
		(QCE) Penanganan Perkara	8,890,853,000	QCE	32	Perkara
			2,235,772,000	QCE.001	11	Perkara
			5,582,035,000	QCE.002	11	Perkara
			1,073,046,000	QCE.003	10	Perkara
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>	<b>4,446,929,000</b>			
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,474,155,000	PBB	10	Rekomendasi Kebijakan
			158,207,000	PBB.001	1	Rekomendasi Kebijakan
			92,585,000	PBB.002	1	Rekomendasi Kebijakan
			280,208,000	PBB.003	3	Rekomendasi Kebijakan
			171,249,000	PBB.004	1	Rekomendasi Kebijakan
			553,333,000	PBB.005	3	Rekomendasi Kebijakan
			218,573,000	PBB.006	1	Rekomendasi Kebijakan
		(QCE) Penanganan Perkara	1,968,974,000	QCE	13	Pekara
			446,197,000	QCE.001	3	Pekara

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode (KRO/RO)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
			511,714,000	QCE.002	3	Pekara
			257,068,000	QCE.003	2	Pekara
			121,774,000	QCE.004	1	Pekara
			122,821,000	QCE.005	1	Pekara
			509,400,000	QCE.006	3	Pekara
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,003,800,000	UBA	17	Prov/Kab/Kota
			75,084,000	UBA.001	1	Prov/Kab/Kota
			75,190,000	UBA.002	1	Prov/Kab/Kota
			117,212,000	UBA.003	1	Prov/Kab/Kota
			386,465,000	UBA.004	9	Prov/Kab/Kota
			73,334,000	UBA.005	1	Prov/Kab/Kota
			21,515,000	UBA.006	1	Prov/Kab/Kota
			255,000,000	UBA.007	3	Prov/Kab/Kota
<b>TOTAL</b>			<b>33,498,875,000</b>			

Catatan:

Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan kumpulan atas keluaran (*output*) Kementerian/Lembaga (Rincian Output – RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis Rincian Output (RO) merupakan keluaran (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

**5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2021 pada Program Dukungan Manajemen Kegiatan Operasional Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional**

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>						
5971	Biro SDM dan Umum	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>	<b>94.316.617.000</b>			
		(EAA) Layanan Perkantoran	69.488.197.000	EAA	2	Layanan
			44.120.992.000	EAA.001	1	Layanan
			25.367.205.000	EAA.002	1	Layanan
		(EAC) Layanan Umum	1.800.306.000	EAC	5	Layanan
			162.444.000	EAC.001	1	Layanan
			672.305.000	EAC.002	1	Layanan
			790.345.000	EAC.003	1	Layanan
			68.903.000	EAC.004	1	Layanan
			106.309.000	EAC.005	1	Layanan
		(EAD) Layanan Sarana Internal	14.451.728.000	EAD	519	Unit
				EAD.001	519	Unit
		(EAF) Layanan SDM	4.922.573.000	EAF	1380	Orang
			105.279.000	EAF.001	69	Orang
			840.000	EAF.002	1	Orang
			17.290.000	EAF.003	262	Orang
			21.130.000	EAF.004	262	Orang
			3.829.327.000	EAF.005	262	Orang
			543.353.000	EAF.006	262	Orang
		(EAI) Layanan Kehumasan dan Protokol	405.354.000	EAF.007	262	Orang
			2.159.135.000	EAI	3	Layanan
			173.965.000	EAI.001	2	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.985.170.000	EAI.002	1	Layanan
			271.903.000	EAL	4	Laporan
			9.840.000	EAL.001	1	Laporan
			40.139.000	EAL.002	1	Laporan
		(FAA) Kearsipan	86.038.000	EAL.003	1	Laporan
			135.886.000	EAL.004	1	Laporan
			96.943.000	FAA	12	Dokumen
				FAA.001	12	Dokumen

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
		(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		FAC		Orang
			1.125.832.000	FAC.001	340	Orang
5972	Unit Pelaksana Pendidikn dan Pelatihn	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>3.789.817.000</b>			
		(BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.912.049.000	BDB	11	Lembaga
			15.690.000	BDB.001	2	Lembaga
			1.896.359.000	BDB.002	9	Lembaga
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	59.058.000	EAL		
				EAL.001	1	Laporan
		(EAM) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1.818.710.000	EAM	410	Orang
			313.569.000	EAM.001	240	Orang
	789.850.000	EAM.002	100	Orang		
	715.291.000	EAM.003	70	Orang		
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Informasi</b>	<b>1.043.286.000</b>			
		(EAJ) Layanan Data dan Informasi	1.043.286.000	EAJ	1	Layanan
			1.043.286.000	EAJ.001	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>	<b>2.249.153.000</b>			
				EAG	5	Layanan
			2.177.199.000			
		(EAG) Layanan Hukum	1.189.560.000	EAG.001	3	Layanan
			956.035.000	EAG.002	1	Layanan
			31.604.000	EAG.003	1	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	71.954.000	EAL	3	Laporan
			8.420.000	EAL.001	1	Laporan
			35.398.000	EAL.002	1	Laporan
			28.136.000	EAL.003	1	Laporan
5975	Biro Humas dan Kerjasama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>	<b>3.343.821.000</b>			
		(AEB) Forum	444.626.000	AEB	2	Forum
			242.626.000	AEB.001	1	Forum

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
			202.000.000	AEB.002	1	Forum
		(AEC) Kerjasama		AEC	6	
			957.532.000	AEC.001	6	Kesepakatan
		(AED) Perjanjian		AED	1	
			32.873.000	AED.001	1	Perjanjian
		(BMA) Data dan Informasi Publik		BMA	1	
			70.000.000	BMA.001	1	Layanan
		(BMB) Komunikasi publik		BMB	1	
			1.143.789.000	BMB.001	1	Layanan
		(EAI) Layanan Kehumasan dan Protokoler		EAI	1	
			566.072.000	EAI.001	1	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	128.929.000	EAL	2	Laporan
			103.929.000	EAL.001	1	Laporan
			25.000.000	EAL.002	1	Laporan
		<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>	<b>479.041.000</b>			
			479.041.000	EAK	7	Laporan
			117.800.000	EAK.001	2	Laporan
		(EAK) Layanan Pengawasan Internal	800.000	EAK.002	1	Laporan
			500.000	EAK.003	1	Laporan
			86.831.000	EAK.004	2	Laporan
			273.110.000	EAK.005	1	Laporan
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>	<b>2.570.012.000</b>			
		(EAB) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	454.043.000	EAB	2	Layanan
			370.257.000	EAB.001	1	Layanan
			83.786.000	EAB.002	1	Layanan
		(FAE) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	614.148.000	FAE	9	Laporan
			614.148.000	FAE.001	9	Laporan
		(FAH) Pengelolaan Keuangan Negara	1.501.821.000	FAH	7	Laporan
			944.811.000	FAH.001	3	Laporan
			557.010.000	FAH.002	4	Laporan
		<b>TOTAL</b>	<b>107.791.747.000</b>			



## 6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2020 dan 2021

2020		2021	
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
114.053.530.000,-	113.228.643.932,-	141.290.622.000,-	136.467.729.454,-

## 7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP dari Denda Persaingan Usaha TA 2020 dan 2021

	2020			2021		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan PNBP	31.647.000.000	37.369.898.638	118,08%	119.433.706.578	148.645.570.171	124,46%
Pemanfaatan PNBP	9.777.000.000	9.662.408.908	98,83%	51.389.000.000	48.681.710.771	95,29%

## 8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2021 (menurut Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>				
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	6.539.071.000	6.471.748.616	98,97%
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	26.959.804.000	26.339.734.497	97,70%
<b>Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal</b>				
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	38.303.550.000	35.962.954.571	93,89%
	Belanja Pegawai	44.120.992.000	42.452.322.044	96,22%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	25.367.205.000	25.240.969.726	99,50%
<b>TOTAL</b>		<b>141.290.622.000</b>	<b>136.467.729.454</b>	<b>96,59%</b>

## 9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU TA 2021 dan 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2021		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7	4.81	4.5	4.5
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	85%	100%	80%	111%
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	78	76	75	103

## LAMPIRAN III

### 1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dan Kedeputian Kajian dan Advokasi TA 2021

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
EG.01	Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik				
01.01	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (Skala 1-7)	Indeks	4	6,1	151,75%
01.02	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 (Skala 1-7)	Indeks	4	6,4	160,00%
EG.02	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha				
02.01	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan	Persentase	21	28,36	135,04%
02.02	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	Persentase	100	100,00	100,00%
02.03	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	Persentase	75	83,33	111,11%
02.04	Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	Persentase	80	100	125,00%
02.05	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	Persentase	90	100	111,11%
02.06	Indeks Layanan Kepaniteraan (Skala 1-7)	Indeks	3,25	4,7	144,62%

## 2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2021

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
WA.01	Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU				
01.01	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	Indeks	62	89,55	144,44%
01.02	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	Persentase	80	88	110,00%
01.03	Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i>	Ratio	2	2	100,00%
WA.02	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi				
02.01	Persentase peningkatan penyiapan <i>instrument</i> reformasi birokrasi	Persentase	85	85,55	100,65%
02.02	Indeks layanan umum operasional teknis internal (Skala 1-7)	Indeks	4,7	5,06	107,66%
02.03	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (Skala 1-7)	Indeks	4,7	5,90	125,53%
02.04	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	Indeks	230	313	136,09%
02.05	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (Skala 1-7)	Indeks	4,0	5,8	145,00%
02.06	Indeks Layanan Hukum (Skala 1-7)	Indeks	4,0	5,89	147,25%
02.07	Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1-5)	Nilai	3	3,82	127,33%
02.08	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU	Opini	WTP	WTP	100,00%

### 3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputan Penegakan Hukum TA 2021

(Direktorat Investigasi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat				
3956.01	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha				
3956.01.01	Persentase laporan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	19	Persen	19	101%
3956.01.02	Persentase laporan hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	21	Persen	60	285%
3956.01.03	Persentase laporan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan	30	Persen	23	77 %

(Direktorat Penindakan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat				
3957.01.01	Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti				
3957.01.01	Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100%
3957.01.02	Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan/sidang majelis komisi	100	Persen	100	100%
3957.01.03	Persentase dikuatkannya putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	62	Persen	88	142 %

(Direktorat Merger dan Akuisisi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% realisasi
3958	Penilaian Merger dan Akuisisi				
3958.01	Terwujudnya penilaian dan penanganan perkara merger dan akuisisi yang efektif				
3958.01.01	Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian	60	Persen	90	150%
3958.01.02	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3958.01.03	Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	150	150%

(Direktorat Pengawasan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
3953	Pengawasan Kemitraan				
3953.01	Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan				
3953.01.01	Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan	100	Persen	260	260%
3953.01.02	Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	175	200%
3953.01.03	Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	125	150%

(Kepaniteraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				
5275.01	Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat				
5275.01.01	Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana	100	Persen	209	209%
5275.01.02	Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan	100	Persen	260	260%
5275.01.03	Jumlah hasil Reviu Putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi	1	Reviu	1	100%

#### 4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputusan Kajian dan Advokasi TA 2021

(Direktorat Ekonomi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				
3952.01	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha				
3952.01.01	Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024	20	Persen	40	200%
3952.01.02	Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha	25	Persen	40	160%
3952.01.03	Indeks Persaingan usaha	1	Survei	1	100%
3952.01.04	Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan	2	Laporan	3	150%



(Direktorat Analisis Kebijakan Pemerintah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5162	Analisis Kebijakan Pemerintah				
5162.01	Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat				
5162.01.01	Persentase pemerintah pusat K/L dan Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses	10	Persen	11	106%
5162.01.02	Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	55	Persen	69	126%
5162.01.03	Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100%
5162.01.04	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	80	Persen	81	101%

## (Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				
5194.01	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat				
5194.01.01	Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat	100	Persen	79,8	80%
5194.01.02	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha ( <i>competition compliance</i> )	400	Pelaku Usaha	506	127%
5194.01.03	Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	8	K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi	8	100%
5194.01.04	Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat	13	Kegiatan	13	100%
5194.01.05	Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi	100	Persen	100	100%

## 5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2021

(Biro SDM dan Umum)

KODE	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% realisasi
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				
5971.01	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia				
5971.01.01	Indeks Kepuasan pengguna layanan SDM (skala 1-7)	4,1	Layanan	5,7	139%
5971.01.02	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar <i>hard competency</i> dan <i>soft competency</i>	56	Persen	88,85	159%
5971.01.03	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	56	Persen	95,6	171%
5971.01.04	Jumlah kebijakan perencanaan SDM	1	Kebijakan	1	100%
5971.01.05	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan SDM (skala 1-7)	4,1	Indeks	6	146%
5971.01.06	Persentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK	82	Persen	96,56	118%
5971.02	Meningkatnya layanan manajemen Barang Milik Negara				
5971.02.01	Persentase utilisasi aset K/L	81	Persen	82,96	102%
5971.02.02	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)	4,7	Indeks	5,5	117%
5971.03	Terwujudnya layanan umum teknis internal				
5971.03.01	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)	4,7	Indeks	5,06	108%
5971.04	Terwujudnya layanan ketatausahaan dan keprotokolan				
5971.04.01	Indeks layanan ketatausahaan dan keprotokoleraan (skala 1-7)	4,7	Indeks	5,90	126%
5971.05	Terwujudnya layanan perkantoran Pusat dan Daerah				
5971.05.01	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)	4,7	Indeks	5,06	108%

(Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan)

KODE	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% realisasi
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
5972.01	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi				
5972.01.01	Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal baik	80	Persen	88	110%
5972.01.02	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)	4,7	Indeks	6,17	131%
5972.01.03	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	70	Persen	118	169%

(Unit Data dan Informasi)

Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5973	Peningkatan Data dan Informasi				
5973.01	Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif				
5973.01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (skala 1-5)	3,6	Indeks	4,4	122%
5973.01.02	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	230	Indeks	313	136%

(Biro Hukum)

Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi				
5974.01	Terwujudnya layanan hukum				
5974.01.01	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	75	Persen	80	107%
5974.01.02	Jumlah verifikasi atas produk hukum	160	Verifikasi	385	241%
5974.02	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU yang efektif				
5974.02.01	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran denda persaingan usaha	13	Persen	24,62	189%
5974.02.02	Persentase target pelaksanaan eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan	6	Persen	20	333%
5974.02.03	Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	22	Pemantauan	70	318%
5974.02.04	Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara	100	Persen	100	100%
5974.03	Terwujudnya layanan bantuan hukum				
5974.03.01	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	100	Persen	100	100%

## (Biro Humas dan Kerjasama)

Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga				
5975.01	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif				
5975.01.01	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)	4,0	Indeks	6,2	155%
5975.01.02	Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional	10	Persen	10	100%
5975.01.03	Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga	16	Persen	16	100%
5975.02	Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan informasi				
5975.02.01	Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	19	Persen	1	100%
5975.02.02	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas peblikasi (skala 1-7)	4,0	Indeks	5,03	126%
5975.02.03	Persentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik	80	Persen	100	125%
5975.03	Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi				
5975.03.01	Survei kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)	4,0	Indeks	6,06	152%

(Satuan Pengawasan Internal)

KODE	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% realisasi
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU				
5976.01	Terwujudnya Layanan Audit Internal				
5976.01.01	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	75	Persen	75,0	100%
5976.01.02	Nilai hasil telaah sejawat	60	Laporan Penilaian	73,95	123%
5976.01.03	Nilai Internal Audit Capability Model	2	Laporan Penilaian	2	100%

(Biro Perencanaan dan Keuangan)

Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU				
5977.01	Terwujudnya layanan perencanaan				
5977.01.01	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan pada tahun berjalan	5	Dokumen	7	140%
5977.02	Terwujudnya layanan pemantauan dan evaluasi				
5977.02.01	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	Laporan	0	0%
5977.02.02	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	92	Nilai Smart	95,98	104%
5977.03	Terwujudnya layanan manajemen keuangan				
5977.03.01	Jumlah laporan keuangan (Tahunan dan Semester)	2	Laporan	2	100%
5977.03.02	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Opini	WTP	100%

## (Kantor Wilayah)

Kode	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2021	
				Realisasi	% Realisasi
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01	Terwujudnya pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01.01	Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	30	Persen	40	133%
3955.01.02	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	50	Persen	100	200%
3955.01.03	Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	60	Persen	88	146%
3955.01.04	Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.05	Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.06	Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.07	Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.08	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	100	Persen	100	100%



## 6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut Road Map SDM 2020 – 2024

Kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagian besar pegawai KPPU adalah investigator. Investigator harus memiliki ilmu-ilmu intelegensi dan memiliki kemampuan ekonomi, hukum, dan pelatihan ke luar negeri untuk memperoleh keahlian khusus. Diharapkan Investigator memiliki pendidikan S3, karena berhadapan dengan pelaku bisnis sehingga harus “setara” dari sisi kompetensi. Kewenangan dalam penyelidikan merupakan kewenangan investigator, berbeda halnya jika penyidik memiliki kewenangan tambahan misalnya menggeledah. Sampai dengan saat ini KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dalam konteks ini, diperlukan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan dengan fokus bidang investigasi, serta bidang merger dan akuisisi (Restrukturisasi). Tuntutan KPPU yang berhadapan dengan korporasi besar diharapkan tidak hanya berbicara mengenai hukum saja, tapi harus dapat melihat dari sisi ekonomi, misal: laporan keuangannya.

Selain itu dibutuhkan kapabilitas sebagai peneliti ekonomi. Maraknya kasus digital ekonomi menjadi tantangan untuk KPPU kedepannya. Kebutuhan SDM KPPU kedepan, selain SDM berlatar belakang hukum, juga perlu SDM berlatar belakang ekonomi dan manajemen, yang dapat melihat struktur pasar, ekonomi dan industri. Selain itu digitalisasi juga menuntut KPPU untuk memiliki ahli merger, ahli IT, ahli aset, dan ahli survei.

Struktur SDM KPPU saat ini adalah lebih banyak yang bersifat *supporting/administrative* dibandingkan dengan SDM yang menempati posisi *core*. Komposisinya adalah 60% SDM *supporting*, 40% SDM *core*. Kondisi struktur SDM seperti ini memang jauh dari ideal. Secara bertahap status maupun proporsi SDM *core* harus lebih tinggi dari SDM *supporting*.

Struktur SDM, perbandingan antara jumlah SDM *supporting* dengan *core* (investigator dan analis) untuk mencapai porsi yang ideal, yaitu 70% *core* dan 30% *supporting*.

Penyesuaian dilakukan secara *gradual* setiap tahun sampai tahun 2024:

- a. Tahun 2020-2021: 50% *core* dan 50% *supporting*
- b. Tahun 2022: 55% *core* dan 45% *supporting*
- c. Tahun 2023: 60% *core* dan 40% *supporting*
- d. Tahun 2024: 70% *core* dan 30% *supporting*

Mengingat perbandingan SDM saat ini lebih banyak yang *supporting*, maka penambahan SDM kedepan diutamakan untuk SDM *core* sampai tahun 2024:

- a. Tahun 2020-2021: 69 investigator dan analis
- b. Tahun 2022: 46 investigator dan analis
- c. Tahun 2023: 56 investigator dan analis
- d. Tahun 2024: 170 investigator dan analis

Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai *core* Berdasarkan *Road Map* SDM 2020-2024 dengan penempatan di setiap unit sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Jumlah Pegawai	Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai Core Berdasarkan Road Map SDM 2020-2024			
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	16	3	0	0	0
2.	Biro Hukum	11	4	0	0	0
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	14	2	0	0	0
4.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	105	2	0	0	0
	• Unit Data dan Informasi	6	1	0	1	0
	• Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3	2	0	1	0
5	Satuan Pengawasan Internal	9	1	0	2	2
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14				
7	Kanwil I Medan	23	4	0	2	5
8	Kanwil II Lampung	19	3	0	2	5
9	Kanwil III Bandung	14	2	0	2	5
10	Kanwil IV Surabaya	16	2	0	2	5
11	Kanwil V Balikpapan	15	3	0	2	5
12	Kanwil VI Makassar	15	5	0	2	5
13	Direktorat Ekonomi	13	2	9	5	14
14.	Direktorat Kebijakan dan Persaingan	10	2	2	2	14
15.	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	10	2	2	2	14
16.	Direktorat Investigasi	20	9	13	11	27
17.	Direktorat Merger dan Akuisisi	15	6	5	4	23
18.	Direktorat Pengawasan Kemitraan	16	4	10	9	18
19.	Direktorat Penindakan	17	6	2	4	15
20.	Kepaniteraan	12	4	0	3	13
		<b>393</b>				
<b>Jumlah Total Persebaran Pegawai Core</b>			<b>69</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>170</b>

## ROAD MAP SDM KPPU 2020 - 2024



KOMPONEN BIAYA	SATUAN	2020-2021	2022	2023	2024
SDM PUSAT TAMBAHAN (CORE)	Orang	32	18	24	80
SDM KANWIL BARU	Orang	9	9	9	9
SDM TAMBAHAN KANWIL EXISTING (CORE)	Orang	28	19	23	81
TOTAL TAMBAHAN SDM CORE	Orang	69	46	56	170
SDM TAMBAHAN KUMULATIF	Orang	69	115	171	341
GAJI RATA-RATA (GOL 5-13) PER BULAN	Rp	10,884,000	10,884,000	10,884,000	10,884,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER BULAN	Rp	750,996,000	1,251,660,000	1,861,164,000	3,711,444,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER TAHUN	Rp	9,011,952,000	15,019,920,000	22,333,968,000	44,537,328,000
JUMLAH KANWIL TAMBAHAN		1	1	1	1
FASILITAS KANWIL BARU	m2	477	477	477	477
PENAMBAHAN FASILITAS PUSAT	m2	160	90	120	400
PENAMBAHAN FASILITAS KANWIL EXISTING	m2	140	95	115	405
TOTAL PENAMBAHAN FASILITAS	m2	777	662	712	1282
BIAYA RATA-RATA PER m2 PER BULAN	Rp	200,000	200,000	200,000	200,000
TOTAL BIAYA FASILITAS TAMBAHAN PER TAHUN	Rp	1,864,800,000	1,588,800,000	1,708,800,000	3,076,800,000
BIAYA PERLENGKAPAN TAMBAHAN EXISTING (MEJA, KURSI, LAPTOP)	Rp	900,000,000	555,000,000	705,000,000	2,415,000,000
BIAYA PERLENGKAPAN KANWIL BARU	Rp	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000
BIAYA PENGEMBANGAN & MAINTENANCE SISTEM OFFICE AUTOMATION	Rp	300,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
TOTAL BIAYA TAMBAHAN	Rp	14,137,652,000	19,324,620,000	26,908,668,000	52,190,028,000

## 7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data *Eksisting* Pegawai KPPU (per 31 Desember 2021)

No	Unit Eselon I	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Per Eselon I	% Jumlah Pegawai Eselon 2 di Eselon 1 (Supporting dan Core)	% Jumlah Pegawai per Eselon I (Supporting & Core)	Jumlah Pegawai Supporting dan Core	% Jumlah Pegawai Eselon 1 Supporting dan Core
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Sekretaris Jenderal	1	197	1%	44%	341	76%
2	Staf Ahli KPPU	3		2%			
3	Kelompok Kerja	9		5%			
4	Dewan Pakar	1		1%			
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	15		8%			
6	Biro Hukum	11		6%			
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	13		7%			
8	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	72		37%			
9	Unit Data dan Informasi	3		2%			
10	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	2		1%			
11	Satuan Pengawasan Internal	6		3%			
12	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	61		31%			
13	Kanwil I Medan	18	144	13%	32%		
14	Kanwil II Lampung	13		9%			
15	Kanwil III Bandung	12		8%			
16	Kanwil IV Surabaya	16		11%			
17	Kanwil V Balikpapan	13		9%			
18	Kanwil VI Makassar	14		10%			
19	Kanwil VII Yogyakarta	8		6%			
20	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	50		35%			
21	Deputi Bidang Kajian dan Advokasi	1	30	3%	7%		
22	Direktorat Ekonomi	8		27%			
23	Direktorat Kebijakan Persaingan	10		33%			
24	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	11		37%			
25	Deputi Bidang Penegakan Hukum	1	75	1%	17%	105	24%
26	Direktorat Investigasi	15		20%			
27	Direktorat Merger dan Akusisi	15		20%			
28	Direktorat Pengawasan Kemitraan	17		23%			
29	Direktorat Penindakan	15		20%			
30	Kepaniteraan	12		16%			
<b>TOTAL</b>		<b>446</b>	<b>446</b>			<b>446</b>	

## 8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di Core dan Supporting TA 2021

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di Supporting dan Core	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di Supporting dan Core	% Anggaran Supporting dan Core (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	Anggaran per Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji & Operasional)
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	2.570.012.000	112.238.676.000	79%	2.570.012.000	2%	42.750.479.000	60%
2	Biro Hukum	2.249.153.000			2.249.153.000	2%		
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	3.343.821.000			3.343.821.000	2%		
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	94.316.617.000			24.828.420.000	18%		
5	Unit Data dan Informasi	1.043.286.000			1.043.286.000	1%		
6	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3.789.817.000			3.789.817.000	3%		
7	Satuan Pengawasan Internal	479.041.000			479.041.000	0,3%		
8	Kanwil I Medan	679.488.000			679.488.000	0,5%		
9	Kanwil II Lampung	679.489.000			679.489.000	0,5%		
10	Kanwil III Bandung	654.488.000			654.488.000	0,5%		
11	Kanwil IV Surabaya	679.488.000			679.488.000	0,5%		
12	Kanwil V Balikpapan	749.488.000			749.488.000	0,5%		
13	Kanwil VI Makassar	749.488.000			749.488.000	0,5%		

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji & Operasional)
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
14	Kanwil VII Yogyakarta	255.000.000			255.000.000	0,2%		
15	Direktorat Ekonomi	2.331.329.000	29.051.946.000	21%	2.331.329.000	2%	29.051.946.000	40%
16	Direktorat Kebijakan Persaingan	1.884.022.000			1.884.022.000	1%		
17	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	2.323.720.000			2.323.720.000	2%		
18	Direktorat Investigasi	4.283.500.000			4.283.500.000	3%		
19	Direktorat Merger dan Akusisi	3.421.969.000			3.421.969.000	2%		
20	Direktorat Pengawasan Kemitraan	2.714.008.000			2.714.008.000	2%		
21	Direktorat Penindakan	3.202.545.000			3.202.545.000	2%		
22	Kepaniteraan	8.890.853.000			8.890.853.000	6%		
<b>TOTAL</b>		<b>141.290.622.000</b>	<b>141.290.622.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.802.425.000</b>	<b>51%</b>	<b>71.802.425.000</b>	<b>100%</b>

Operasional Perkantoran 25.367.205.000  
 Gaji dan Tunjangan 44.120.992.000

Total Anggaran tanpa Operasional dan Gaji 71.802.425.000

**9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2021 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>								
<b>3952</b>	<b>Direktorat Ekonomi</b>	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>	<b>2.331.329.000</b>	<b>2.322.409.655</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2.331.329.000	2.322.409.655	PBB	6	7	Rekomendasi Kebijakan
			2.122.158.000	2.115.377.548	PBB.001	5	6	Rekomendasi Kebijakan
			209.171.000	207.032.107	PBB.002	1	1	Rekomendasi Kebijakan
<b>5162</b>	<b>Direktorat Kebijakan Persaingan</b>	<b>Analisis Kebijakan Pemerintah</b>	<b>1.884.022.000</b>	<b>1.839.921.091</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.778.732.000	1.743.051.891	PBB	8	41	Rekomendasi kebijakan
			1.058.166.000	1.037.347.469	PBB.001	4	13	Rekomendasi kebijakan
			175.526.000	166.731.639	PBB.002	2	26	Rekomendasi kebijakan
			545.040.000	538.972.783	PBB.003	2	2	Rekomendasi kebijakan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
		(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	105.290.000	96.869.200	UAB	1	1	
			105.290.000	96.869.200	UAB.001	1	1	Sistem Informasi
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>	<b>2.323.720.000</b>	<b>2.318.885.960</b>				
		(PEB) Forum	105.000.000	104.345.802	PEB	2	2	Forum
			105.000.000	104.345.802	PEB.001	2	2	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	212.180.000	211.820.640	QDB	2	7	Lembaga
			161.076.000	160.786.210	QDB.001	1	5	Lembaga
			51.104.000	51.034.430	QDB.002	1	2	Lembaga
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2.006.540.000	2.002.719.518	QDH	19	19	Badan Usaha
			689.426.000	687.621.117	QDH.001	10	10	Badan Usaha
			1.317.114.000	1.315.098.401	QDH.002	9	9	Badan Usaha
3953		<b>Pengawasan Kemitraan</b>	<b>2.714.008.000</b>	<b>2.706.060.849</b>				



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO		Satuan
						Targ et	Realisa si	
	<b>Direktorat Pengawasan Kemitraan</b>		2.714.008.000	2.706.060.849	QCE	13	25	Perkara
		(QCE) Penanganan Perkara	1.047.135.000	1.041.850.105	QCE.001	4	12	Perkara
			113.544.000	113.262.000	QCE.002	1	1	Perkara
			865.197.000	863.856.535	QCE.003	4	7	Perkara
			688.132.000	687.092.209	QCE.004	4	5	Perkara
<b>3958</b>	<b>Direktorat Merger</b>	<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>	<b>3.421.969.000</b>	<b>3.340.362.046</b>				
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	327.607.000	313.848.496	QCD	2	3	Perkara
			327.607.000	313.848.496	QCD.002	2	3	Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2.773.262.000	2.729.097.047	QIH	52	382	Badan Usaha
			1.345.329.000	1.313.356.574	QIH.001	26	207	Badan Usaha
			1.427.933.000	1.415.740.473	QIH.002	26	175	Badan Usaha
		(RAH) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	321.100.000	297.416.503	RAH	1	1	Unit
			321.100.000	297.416.503	RAH.001	1	1	Unit

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>	<b>4.283.500.000</b>	<b>4.243.250.385</b>				
		(QCE) Penanganan perkara	4.283.500.000	4.243.250.385	QCE	53	99	Perkara
			1.738.425.000	1.724.267.399	QCE.001	28	52	Perkara
			865.702.000	846.179.879	QCE.002	7	15	Perkara
			1.529.373.000	1.523.410.579	QCE.003	16	30	Perkara
			150.000.000	149.392.528	QCE.004	2	2	Perkara
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>	<b>3.202.545.000</b>	<b>3.185.056.626</b>				
		(QCE) Penanganan Perkara	3.202.545.000	3.185.056.626	QCE	28	46	Perkara
			564.698.000	559.997.370	QCE.001	4	6	Perkara (Pemberkasan)
			1.555.083.000	1.546.346.524	QCE.002	14	23	Perkara (Penuntuan)
			1.082.764.000	1.078.712.732	QCE.003	10	17	Perkara (Litigasi)

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO		Satuan
						Targ et	Realisa si	
5275	Kepaniteran	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>	<b>8.890.853.000</b>	<b>8.701.400.105</b>				
			8.890.853.000	8.701.400.105	QCE	32	72	Perkara
		(QCE) Penanganan Perkara	2.235.772.000	2.180.933.140	QCE.001	11	24	Perkara
			5.582.035.000	5.527.439.541	QCE.002	11	22	Perkara
			1.073.046.000	993.027.424	QCE.003	10	26	Perkara
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>	<b>4.446.929.000</b>	<b>4.429.138.074</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.474.155.000	1.469.791.430	PBB	10	19	Rekomendasi Kebijakan
			158.207.000	158.191.300	PBB.001	1	3	Rekomendasi Kebijakan
			92.585.000	91.995.370	PBB.002	1	1	Rekomendasi Kebijakan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO)		Satuan
						Targ et	Realisa si	
			280.208.000	280.135.612	PBB.003	3	4	Rekomendasi Kebijakan
			171.249.000	171.221.879	PBB.004	1	4	Rekomendasi Kebijakan
			553.333.000	550.232.154	PBB.005	3	3	Rekomendasi Kebijakan
			218.573.000	218.015.115	PBB.006	1	4	Rekomendasi Kebijakan
		(QCE) Penanganan Perkara	1.968.974.000	1.961.317.394	QCE	13	20	Pekara
			446.197.000	441.473.315	QCE.001	3	7	Pekara
			511.714.000	509.960.482	QCE.002	3	3	Pekara
			257.068.000	256.970.966	QCE.003	2	2	Pekara
			121.774.000	121.761.588	QCE.004	1	2	Pekara
			122.821.000	122.174.800	QCE.005	1	3	Pekara
			509.400.000	508.976.243	QCE.006	3	3	Pekara
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.003.800.000	998.029.250	UBA	17	22	Prov/Kab/Kota
			75.084.000	73.029.908	UBA.001	1	1	Prov/Kab/Kota

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output (KRO)/RO)		Satuan
						Targ	Realisa	
						et	si	
			75.190.000	74.667.443	UBA.002	1	1	Prov/Kab/Kota
			117.212.000	115.007.526	UBA.003	1	3	Prov/Kab/Kota
			386.465.000	386.205.419	UBA.004	9	10	Prov/Kab/Kota
			73.334.000	72.830.000	UBA.005	1	1	Prov/Kab/Kota
			21.515.000	21.452.845	UBA.006	1	3	Prov/Kab/Kota
			255.000.000	254.836.109	UBA.007	3	3	Prov/Kab/Kota
<b>TOTAL</b>			<b>33.498.875.000</b>	<b>33.086.484.791</b>				

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi SAS

**10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2021 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan	
						(KRO)/RO)			
						Target	Realisasi		
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>									
5971	Biro SDM dan Umum	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>	<b>94.316.617.000</b>	<b>90.679.143.874</b>					
		(EAA) Layanan Perkantoran	69.488.197.000	67.698.501.582	EAA	2	2	Layanan	
			44.120.992.000	42.454.556.044	EAA.001	1	1	Layanan	
			25.367.205.000	25.243.945.538	EAA.002	1	1	Layanan	
		(EAC) Layanan Umum	1.800.306.000	1.750.825.699	EAC	5	5	Layanan	
			162.444.000	162.333.326	EAC.001	1	1	Layanan	
			672.305.000	622.994.121	EAC.002	1	1	Layanan	
			790.345.000	790.324.386	EAC.003	1	1	Layanan	
			68.903.000	68.867.256	EAC.004	1	1	Layanan	
			106.309.000	106.306.610	EAC.005	1	1	Layanan	
			(EAD) Layanan Sarana Internal	14.451.728.000	12.691.517.344	EAD	519	622	Unit
		14.451.728.000		12.691.517.344	EAD.001	519	622	Unit	
		(EAF) Layanan SDM	4.922.573.000	4.920.388.178	EAF	1380	2260	Orang	

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
			105.279.000	104.936.300	EAF.001	69	69	Orang
			840.000	839.100	EAF.002	1	1	Orang
			17.290.000	16.894.043	EAF.003	262	446	Orang
			21.130.000	21.122.790	EAF.004	262	435	Orang
			3.829.327.000	3.829.311.338	EAF.005	262	417	Orang
			543.353.000	543.326.846	EAF.006	262	446	Orang
			405.354.000	403.957.761	EAF.007	262	446	Orang
		(EAI) Layanan Kehumasan dan Protokol	2.159.135.000	2.142.856.352	EAI	3	3	Layanan
			173.965.000	171.086.391	EAI.001	2	2	Layanan
			1.985.170.000	1.971.769.961	EAI.002	1	1	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	271.903.000	270.187.121	EAL	4	4	Laporan
			9.840.000	9.537.400	EAL.001	1	1	Laporan
			40.139.000	38.950.625	EAL.002	1	1	Laporan
			86.038.000	85.823.300	EAL.003	1	1	Laporan
			135.886.000	135.875.796	EAL.004	1	1	Laporan
		(FAA) Kearsipan	96.943.000	96.105.521	FAA	12	12	Dokumen
			96.943.000	96.105.521	FAA.001	12	12	Dokumen
		(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.125.832.000	1.108.762.077	FAC	340	350	Orang

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
			1.125.832.000	1.108.762.077	FAC.001	340	350	Orang
5972	Unit Pelaksana Pendidikn dan Pelatihn	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>3.789.817.000</b>	<b>3.658.081.628</b>				
		(BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.912.049.000	1.866.769.809	BDB	11	12	Lembaga
			15.690.000	4.260.000	BDB.001	2	3	Lembaga
			1.896.359.000	1.862.509.809	BDB.002	9	9	Lembaga
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	59.058.000	56.369.950	EAL	1	1	Laporan
			59.058.000	56.369.950	EAL.001	1	1	Laporan
		(EAM) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1.818.710.000	1.734.941.869	EAM	410	564	Orang
			313.569.000	254.495.625	EAM.001	240	363	Orang
			789.850.000	769.992.877	EAM.002	100	117	Orang
			715.291.000	710.453.367	EAM.003	70	84	Orang
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Infromasi</b>	<b>1.043.286.000</b>	<b>1.036.660.815</b>	EAJ	1	1	Layanan



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
		(EAJ) Layanan Data dan Informasi	1.043.286.000	1.036.660.815	EAJ.001	1	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>	<b>2.249.153.000</b>	<b>2.151.582.675</b>				
		(EAG) Layanan Hukum	2.177.199.000	2.083.023.051	EAG	5	5	Layanan
			1.189.560.000	1.117.373.196	EAG.001	3	3	Layanan
			956.035.000	935.591.078	EAG.002	1	1	Layanan
			31.604.000	30.058.777	EAG.003	1	1	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	71.954.000	68.559.624	EAL	3	3	Laporan
			8.420.000	6.954.000	EAL.001	1	1	Laporan
			35.398.000	34.040.090	EAL.002	1	1	Laporan
			28.136.000	27.565.534	EAL.003	1	1	Laporan
5975	Biro Humas dan Kerjasama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>	<b>3.343.821.000</b>	<b>3.283.496.788</b>				
		(AEB) Forum	444.626.000	437.496.774	AEB	2	2	Forum
			242.626.000	238.918.796	AEB.001	1	1	Forum
			202.000.000	198.577.978	AEB.002	1	1	Forum

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
		(AEC) Kerjasama	957.532.000	952.561.061	AEC	6	6	Kesepakatan
			957.532.000	952.561.061	AEC.001	6	6	Kesepakatan
		(AED) Perjanjian	32.873.000	32.712.000	AED	1	1	Perjanjian
			32.873.000	32.712.000	AED.001	1	1	Perjanjian
		(BMA) Data dan Informasi Publik	70.000.000	65.701.620	BMA	1	1	Layanan
			70.000.000	65.701.620	BMA.001	1	1	Layanan
		(BMB) Komunikasi publik	1.143.789.000	1.100.989.827	BMB	1	1	Layanan
			1.143.789.000	1.100.989.827	BMB.001	1	1	Layanan
		(EAI) Layanan Kehumasan dan Protokoler	566.072.000	565.565.801	EAI	1	1	Layanan
			566.072.000	565.565.801	EAI.001	1	1	Layanan
		(EAL) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	128.929.000	128.469.705	EAL	2	2	Laporan
			103.929.000	103.469.705	EAL.001	1	1	Laporan
			25.000.000	25.000.000	EAL.002	1	1	Laporan
<b>5976</b>	<b>Satuan Pengawasan Internal</b>	<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>	<b>479.041.000</b>	<b>477.776.117</b>				
			479.041.000	477.776.117	EAK	7	7	Laporan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
		(EAK) Layanan Pengawasan Internal	117.800.000	117.541.991	EAK.001	2	2	Laporan
			800.000	746.650	EAK.002	1	1	Laporan
			500.000	162.500	EAK.003	1	1	Laporan
			86.831.000	86.722.931	EAK.004	2	2	Laporan
			273.110.000	272.602.045	EAK.005	1	1	Laporan
5977	Biro Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>	<b>2.570.012.000</b>	<b>2.471.285.261</b>				
		(EAB) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	454.043.000	453.917.475	EAB	2	2	Layanan
			370.257.000	370.188.265	EAB.001	1	1	Layanan
			83.786.000	83.729.210	EAB.002	1	1	Layanan
		(FAE) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	614.148.000	558.045.759	FAE	9	9	Laporan
			614.148.000	558.045.759	FAE.001	9	9	Laporan
		(FAH) Pengelolaan Keuangan Negara	1.501.821.000	1.459.322.027	FAH	7	7	Laporan
			944.811.000	905.461.663	FAH.001	3	3	Laporan
			557.010.000	553.860.364	FAH.002	4	4	Laporan
		<b>TOTAL</b>			<b>107.791.747.000</b>	<b>103.758.027.158</b>		

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi SAS

# KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120

Website | [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)  
Email | [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)

## KANWIL I

Jalan Gatot Subroto No.148 B,  
Sekip, Medan Petisah  
Kota Medan, Sumatera Utara  
201113  
Telp. : 061-4558133 / 88741230  
Faks : 061-4148603  
Email: [kpd\\_medan@icc.go.id](mailto:kpd_medan@icc.go.id) /  
[kanwil1@kppu.go.id](mailto:kanwil1@kppu.go.id)

## KANWIL II

Jl. Diponegoro, Kel Sumur Batu,  
Kec Teluk Betung Utara, Kota  
Bandar Lampung, Lampung 35212  
Telp. : 0721-6013235  
Faks. : 0721-6016498  
email : [kanwil2@kppu.go.id](mailto:kanwil2@kppu.go.id)

## KANWIL III

Jl. PH. H. Mustofa No.22  
Kota Bandung  
Jawa Barat 40124  
Telp. : 022-20506680  
Faks. : 022-20506680  
email : [kanwil3@kppu.go.id](mailto:kanwil3@kppu.go.id)

## KANWIL IV

Gedung Mandiri  
Jl. Basuki Rahmat No.129-137 Lt.7  
Surabaya 60271.  
Telp. : 031-545 4146, 534 4410  
Faks : 031-5341949  
email:[kpd\\_surabaya@icc.go.id](mailto:kpd_surabaya@icc.go.id)/  
[kanwil4@kppu.go.id](mailto:kanwil4@kppu.go.id)

## KANWIL V

Gedung Keuangan Negara (GKN)  
Balikpapan Lt.3  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28,  
Balikpapan  
Kalimatan Timur 76113  
Telp. : 0542-730373  
Faks : 0542-415-939  
email:[kpd\\_balikpapan@icc.go.id](mailto:kpd_balikpapan@icc.go.id) /  
[kanwil5@kppu.go.id](mailto:kanwil5@kppu.go.id)

## KANWIL VI

Gedung Keuangan Negara II Lt.6  
Jl. Urip Sumoharjo KM.4  
Makassar, Sulawesi Selatan.  
Telp. : 0411-429927/429957  
Faks. : 0411-429958  
email:[kpd\\_makassar@icc.go.id](mailto:kpd_makassar@icc.go.id) /  
[kanwil6@kppu.go.id](mailto:kanwil6@kppu.go.id)

## KANWIL VII

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1,  
Pringgokusuman, Gedong Tengen,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55272.  
Telp. : 0274-5017163  
Faks. : 0274-5017163  
Email:[kanwil7@icc.go.id](mailto:kanwil7@icc.go.id) /  
[kanwil7@kppu.go.id](mailto:kanwil7@kppu.go.id)